

SKRIPSI

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

RADJA PEBRIADI ZURI
NPM. 2002110036



**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH ACEH
TAHUN 2026**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Februari 2026

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RADJA PEBRIADI ZURI

NPM : 2002110036

Dengan judul:

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Pembimbing II

Maya Agustina, S.E., M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK. 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Februari 2026

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RADJA PEBRIADI ZURI
NPM : 2002110036


Dengan judul:

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Februari 2026

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Sekretaris


Maya Agustina, S.E., M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001

Anggota


Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK. 19820911 201306 1 001

Anggota


Maidar, S.E., M.Si
NIP. 19801231 200802 2001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Februari 2026
Yang Menyatakan,



RADJA PEBRIADI ZURI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RADJA PEBRIADI ZURI
NPM : 2002110036
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Yang Menyatakan,




RADJA PEBRIADI ZURI

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Realisasi Anggaran menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan serta mengelola belanja secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode 2022–2024. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efisiensi menunjukkan rasio sebesar 99,27% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Sementara itu, hasil efektivitas pendapatan daerah secara keseluruhan selama tiga tahun memiliki rata-rata efektivitas sebesar 105,45%, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah direalisasikan dengan sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum optimal karena realisasi belanja hampir mendekati total anggaran dan melebihi pendapatan daerah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan efektivitas yang sangat baik namun efisiensi belanja masih perlu ditingkatkan agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : laporan realisasi anggaran, kinerja keuangan, pemerintah daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION REPORTS TO ASSESS THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF ACEH BARAT REGENCY

Assessing the financial performance of local governments is an essential component in achieving transparent and accountable public financial management. The Budget Realization Report serves as the primary instrument to evaluate the government's ability to achieve revenue targets and manage expenditures efficiently. This study aims to analyze the budget realization report to assess the financial performance of the government of Aceh Barat Regency for the period 2022-2024. The study employs secondary data obtained from the Budget Realization Report. The results indicate that the efficiency analysis shows a ratio of 99,27%, which is falls within the less efficient category. Meanwhile, the overall effectiveness of regional revenue over the three-year period shows an average effectiveness ratio of 105,45%, demonstrating that revenue realization has been highly effective. This indicates that budget utilization is not yet optimal, as expenditure realization is nearly equal to the total allocated budget and exceeds regional revenue. Overall, the financial performance of the Government of Aceh Barat Regency reveals a highly effective revenue realization; however, expenditure efficiency still needs improvement to ensure more optimal and sustainable regional financial management.

Keywords : *budget realization report, financial performance, local government.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Akuntansi Fpakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Radja Pebriadi Zuri
NPM. 2002110036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Anggaran dalam Sektor Publik	8
2.2 Laporan Keuangan	10
2.3 Laporan Realisasi Anggaran	17
2.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Deviasi Anggaran	21
2.5 Kinerja Keuangan Daerah	21
2.6 Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	34
2.7 Penelitian Terdahulu	36
2.8 Kerangka Pemikiran	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Instrumen Penelitian	49
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2 Hasil Penelitian	58
4.3 Pembahasan	67
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
4.1 Struktur Organisasi BPKD Aceh Barat.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (2022-2024)	5
2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas	31
2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Anggaran.....	32
2.3 Peneliti Sebelumnya	39
3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Anggaran.....	50
3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas.....	52
4.1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024	59
4.2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2024	61
4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2024	64
4.4 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks organisasi, anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja finansial (Sariono & Marison, 2024). Anggaran tidak hanya menjadi rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen akuntabilitas guna memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Di sektor pemerintahan, anggaran adalah alat yang vital untuk mencapai tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran melalui analisis laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut mencatat sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan telah terealisasi dalam bentuk pengeluaran, serta apakah anggaran yang telah disiapkan digunakan secara efisien dan efektif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan apakah anggaran tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2017).

Dalam praktiknya, realisasi anggaran sering kali mengalami deviasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti perencanaan yang tidak akurat atau keterlambatan dalam pelaksanaan proyek) maupun faktor eksternal (misalnya

perubahan kebijakan pemerintah) (Alhabsi, et al, 2023). Ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi berpotensi menunjukkan ketidakefisienan, lemahnya perencanaan, atau bahkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Dalam konteks pemerintahan, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja organisasi, yaitu tingkat pencapaian hasil atau output dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2016).

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan berbagai metode analisis seperti analisis rasio, analisis varians, dan analisis pertumbuhan. Analisis rasio menjadi teknik yang paling sering digunakan karena mampu menunjukkan hubungan proporsional antara anggaran dan realisasinya serta memberikan gambaran efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun (Harahap, 2020). Penilaian ini penting untuk mengukur apakah kinerja anggaran pemerintah daerah sudah optimal sesuai prinsip *good governance*.

Di Indonesia, anggaran pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tingkat pusat, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tingkat daerah. Anggaran ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memajukan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Realisasi anggaran yang baik menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi dapat menjadi indikator ketidakefisienan dalam penggunaan dana, atau bahkan penyalahgunaan anggaran (Ginting, et al, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang akuntabel perlu dievaluasi melalui laporan keuangan, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan selama satu periode, termasuk untuk tujuan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja (Sujarweni, 2015). Pemerintah daerah wajib menyusun komponen laporan keuangan sesuai ketentuan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Ratmono, 2017). LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya (Haigustina, 2023). Laporan ini menjadi dasar evaluasi akuntabilitas fiskal pemerintah daerah.

Pelaksanaan LRA memiliki landasan hukum yang kuat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, termasuk realisasi APBN/APBD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang berisi salah satunya Laporan Realisasi Anggaran, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan LRA oleh pemerintah daerah menjadi kewajiban formal sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain memahami dasar hukum, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran membutuhkan metode analisis yang tepat. Berbagai teknik digunakan dalam menilai kinerja keuangan seperti analisis varians, analisis pertumbuhan, dan analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu teknik yang penting karena memberikan gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk melihat kecenderungan efisiensi dan efektivitas dari tahun ke tahun (Harahap, 2020).

Pada tingkat daerah, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah (Ismail, 2024). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan pendapatan, belanja, dan penyusunan LRA.

Pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan realisasi anggaran, rendahnya serapan anggaran, serta munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian belanja, kesalahan pencatatan, atau kekurangan volume pekerjaan. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar lebih akuntabel dan efektif. Kondisi serupa juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten Aceh Barat berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,351 triliun, dengan realisasi

belanja daerah mencapai Rp 1,356 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp 107,7 miliar. Meskipun terdapat pencapaian positif dalam realisasi pendapatan dan belanja, namun terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kekurangan volume dalam beberapa paket pekerjaan belanja modal (Iskandar, 2024). Disamping itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran di daerah ini dipicu oleh lemahnya perencanaan APBD dan ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi meningkatkan SILPA (Afryansyah, 2023).

Berikut realisasi anggaran tahun 2022-2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (2022-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.505,65	104,49
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	99,33%
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08%

Sumber : Data Sekunder, 2022, 2023 dan 2024

Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2022 realisasi mencapai 104,49% dari target, menurun pada 2023 menjadi 99,33%, dan kembali meningkat pada 2024 sebesar 112,08%. Fluktuasi yang signifikan tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan

dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami tentang analisis laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan terkait masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah rasio efisiensi realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 – 2024?
2. Bagaimana rasio efektifitas realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah berdasarkan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari teori Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Kabupaten Aceh Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, manfaat penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 – 2024.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran dalam Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana keuangan yang berisi estimasi pendapatan dan belanja pada suatu periode tertentu. Dalam konteks sektor publik, anggaran berfungsi tidak hanya sebagai rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol, koordinasi, evaluasi kinerja, serta sarana akuntabilitas pemerintah kepada publik (Mardiasmo, 2018).

Anggaran pemerintah disusun berdasarkan prioritas pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien (Ginting, et al, 2024). Menurut Halim (2016), anggaran publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat karena mengutamakan kepentingan umum dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, partisipatif disiplin anggaran dan akuntabilitas.

Anggaran merupakan penyertaan perkiraan kinerja yang seharusnya akan dicapai selama periode tertentu dalam bulan atau tahun yang didefinisikan dalam bentuk finansial (Mardiasmo, 2018). Rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif tersebut semestinya dapat diukur menggunakan satuan keuangan dan standar ukur lainnya dalam jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan representasi dari suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan atau program yang dimiliki (Putra & Novia, 2020).

Anggaran adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar setiap rencana dapat diwujudkan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Untuk mencapai efektivitas, penyusunan anggaran memerlukan kemampuan untuk memproyeksikan kondisi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi (Umarella, 2019).

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dirancang secara tertulis, bersifat kuantitatif, formal, dan terstruktur, yang memuat estimasi kegiatan, pendapatan, serta pengeluaran dalam bentuk satuan uang, dan berlaku untuk periode tertentu dalam aktivitas operasional harian. Selain itu, anggaran juga berperan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengendalian, yang memungkinkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dengan membandingkannya pada rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Riadi, 2021).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah mencakup rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut pengelompokan tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Sangadji (2019), mendefinisikan anggaran sebagai rencana kerja secara kuantitatif aktivitas usaha sebuah perusahaan (pemasaran, produksi, dan keuangan).

Menurut Umar (2016), anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi panduan bagi anggota organisasi dalam melakukan suatu tindakan yang akan direalisasikan, memberi masukan dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), setelah semua rencana ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditentukan.
3. Menggerakkan (*Actuating*), setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan agar dapat bekerja dengan optimal dalam mencapai tujuan perusahaan.
4. Pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilai dalam kegiatan setiap bagian dari perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi ini disajikan untuk membantu para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional dan berdasarkan data yang dapat diandalkan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Menurut Harahap (2015), laporan keuangan adalah media yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu organisasi kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan tidak hanya menggambarkan

kondisi keuangan masa lalu, tetapi juga menjadi dasar dalam memprediksi kinerja di masa depan.

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (IAI, 2015). Karakteristik ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat dalam menilai kinerja serta kondisi suatu entitas.

Menurut Munawir (2014), laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja manajemen. Melalui laporan keuangan, pihak internal dapat menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya organisasi, sedangkan pihak eksternal dapat menilai kemampuan organisasi memenuhi kewajiban dan mengelola aset secara berkelanjutan.

Standar laporan keuangan pemerintah di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (Ratmono, 2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya publik. Laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta capaian pelaksanaan anggaran suatu entitas pemerintah (Sjarweni, 2015).

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya publik. Laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta capaian pelaksanaan anggaran suatu entitas pemerintah (Sujarweni, 2015).

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi anggarannya.
5. Menyediakan informasi tentang cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi tentang potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar, tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik
2. Sebagai alat akuntabilitas public
3. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mahmudi, 2019).

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :
 - a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat

didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali.

- b. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari :
 - (1) laba rugi; (2) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan (3) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.
4. Laporan arus kas selama periode. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau

rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.3 Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016), pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur tentang keuangan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur keuangan Negara.
2. Undang-Undang di bidang keuangan Negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan merupakan ukuran normative yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat tercapai tujuannya.

1. Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terdapat didalamnya dapat memberikan pengaruh pada keputusan penggunaan dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta menegaskan atau memperbaiki hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan seperti memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kelainan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut berpotensi menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut ini:
 - a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan kejujuran peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau disajikan secara wajar.
 - b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan tidak jauh berbeda jika dilakukan pengujian oleh pihak berbeda.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas

pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada catatan atas laporan keuangan.

4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunaan. Untuk itu, penggunaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 61 laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/ daerah dalam suatu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memuat rincian mengenai pencapaian atas anggaran yang telah disusun dalam periode tertentu. LRA menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilakukan selama tahun anggaran. Laporan ini sangat penting dalam memberikan gambaran tentang seberapa efisien dan efektif pengelolaan anggaran daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah (Pemerintah Daerah, 2013).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Milla, 2021).

2.3.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Dasar Hukum Laporan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan dan penyusunan LRA diatur dalam beberapa regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini menegaskan bahwa APBN/APBD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan melalui laporan keuangan pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal ini mengatur kewajiban pemerintah menyusun laporan keuangan yang di dalamnya termasuk LRA.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengatur penyajian LRA sebagai salah satu laporan keuangan utama pemerintah.
4. Permendagri Noor 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

2.3.3 Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran

1. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah.
3. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis actual, tetap menyusun laporan realisasi anggaran yang berbasis kas.

2.3.4 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Manfaat yang didapat dengan dibuatnya laporan realisasi anggaran adalah sebagai *productive value*, yang artinya informasi yang dijadikan gambaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan alat proyeksi kebijakan keuangan dan sebagai *feedback value*, yang berarti informasi dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen.

Menurut Nurfadillah (2018), laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Memberikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang bertujuan untuk memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode kedepannya dengan menyajikan laporan secara komparatif.

2.4 Realisasi Anggaran dan Deviasi Anggaran

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat pencapaian anggaran yang telah direncanakan. Deviasi anggaran dapat berupa selisih lebih atau selisih kurang realisasi terhadap anggaran yang disebabkan oleh faktor internal seperti perencanaan yang kurang tepat, atau faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah (Alhabsi et al., 2023).

Menurut Bastian (2017), realisasi anggaran yang ideal adalah yang mendekati target anggaran tanpa menimbulkan pemborosan atau ketidakefisienan. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Dien, et al, 2015).

Kinerja keuangan daerah adalah penilaian terhadap sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran yang disusun dengan realisasinya, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang ada. Menurut Susanto (2018), kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui beberapa indikator, di antaranya adalah:

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengukur kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber internalnya.
- b. Rasio Belanja: Menilai seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung.
- c. Rasio Pembiayaan: Mengukur sejauh mana pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

2.4.1 Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2019) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur kinerja tingkat 3E, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas untuk memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Menurut Sujarweni (2015) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Dapat memperbaiki kinerja masa depan agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor public.
2. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab public.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas public.

Menurut Sujarweni (2015) informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu:

1. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja actual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan (*revenue variance*) dan varians pengeluaran (*expenditure variance*). Setelah dilakukan analisis varians, maka tahap selanjutnya yaitu identifikasi

sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga manajemen paling bawah.

2. Informasi non finansial. Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*. Metode *Balanced Scorecard* merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial. *Balanced Scorecard* dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan non finansial.

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti dasar hukum, regulasi, serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi kinerja keuangan pemerintah.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pasal 31 menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang menjadi dasar untuk mengukur kinerja keuangan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur pelaksanaan APBN/APBD, pertanggungjawaban anggaran, serta kewajiban pemerintah menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan lainnya. Penilaian kinerja keuangan dilakukan berdasarkan sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai rencana dan hasilnya dapat diukur.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada UU ini disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan landasan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. SAP mengatur komponen laporan keuangan pemerintah, termasuk LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CALK. Dalam konteks penilaian kinerja keuangan, PP Nomor 71 tahun 2010 memberikan standar penyajian laporan keuangan yang memungkinkan dilakukannya analisis rasio

keuangan, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio keserasian.

5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual. Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini penting karena keakuratan laporan keuangan sangat menentukan validitas penilaian kinerja keuangan daerah.
6. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini menjadi pedoman pelaksanaan siklus anggaran daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Dalam permendagri ini dijelaskan bahwa penilaian kinerja keuangan merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran.

Menurut Sedarmayanti (2013) beberapa tujuan penilaian kinerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai.
2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin.
4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antar atasan dan bawahan.

5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja.
6. Supaya karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu untuk berkembang.
7. Hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.

2.4.3 Tahap-tahap Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018) Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review dilakukan bertujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode umum yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a. *Time Series Analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antarperiode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross Sectional Approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang atau normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan apa saja dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.
 5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.4.4 Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan angka-angka yang tercipta dari perbandingan suatu angka keuangan terhadap angka keuangan lainnya. Angka

tersebut dimunculkan dalam laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan catatan tambahan tentang laporan keuangan. Hasil dari rasio keuangan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen selama periode waktu tertentu dan melakukan evaluasi efektivitas manajemen dalam menjamin akuntabilitas sumber daya perusahaan. Rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan dalam membandingkan angka yang terdapat pada laporan keuangan dengan membagi suatu angka dengan angka yang lainnya (Darmawan, 2020).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relative sama untuk dilihat posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut Halim (2012), terdapat beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan APBD yaitu DPRD, Pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber : Karina (2019)

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Karina (2019)

Adapun beberapa kriteria pengukuran efektivitas, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Zainuddin (2019)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun rumus untuk menghitung efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Karina (2019)

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase
Sangat efisien	<60%
Efisien	60-80%
Cukup efisien	81-90%
Kurang efisien	91-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber : Pujiastuti (2020)

4. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2012) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi presentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Menurut Prasetya (2019) rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya

proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Prasetya, 2019

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan anatar total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut Prasetya (2019) rasio ini dapat diketahui dengan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja kodal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanj modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Prasetya, 2019

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Prasetya (2019) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Diharapkan

pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber : Karina, 2019

Keterangan :

X_n : Tahun yang dihitung

X_{n-1} : Tahun sebelumnya

2.6 Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi

mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode anggaran. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA berfungsi untuk menilai kinerja pelaksanaan APBD, terutama dari aspek efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Analisis terhadap LRA menjadi sangat penting dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah karena sebagian besar indikator kinerja keuangan bersumber langsung dari data yang disajikan dalam LRA. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa rasio-rasio seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio kemandirian dikalkulasi berdasarkan informasi yang terdapat pada LRA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi kinerja keuangan sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan data pada LRA.

Analisis LRA memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah mampu untuk merealisasikan pendapatan sesuai target, menggunakan belanja secara efisien, menentukan prioritas belanja yang serasi, dan mengelola ketergantungan fiskal.

Dengan demikian, hubungan antara analisis LRA dan penilaian kinerja keuangan bersifat langsung dan integral. LRA berperan sebagai data utama yang menjadi dasar perhitungan rasio kinerja keuangan yang menggambarkan kualitas pengelolaan APBD. Tanpa analisis mendalam terhadap LRA, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat dinilai secara objektif, komprehensif, dan terukur (Mahsun (2016); Mahmudi (2019)).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2024) tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas realisasi anggaran mencapai 94% pada tahun 2019-2023 yang berada pada kategori efektif. Tingkat efisiensi anggaran menunjukkan hasil sangat efisien yaitu 94%.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2024) tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan analisis terhadap realisasi anggaran kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan kantor Camat Liukang Kalmas berada pada tingkat kurang efisien dimana tingkat efisiensi yang diperoleh selama 5 tahun berturut semuanya berada dalam kategori 90-100%. Dan rasio efektivitas kinerja kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep sudah termasuk baik dimana persentase efektivitasnya 100% keatas setiap tahunnya, sehingga dapat diartikan sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasha (2023) tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

deskriptif kuantitatif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mengenai analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah mencapai target, termasuk dalam kategori sangat efektif hal ini diketahui dari lebih besarnya jumlah yang terealisasi dengan dana yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda dinilai sangat eisin dikarenakan mampu melakukan penghematan anggaran. Hal ini terjadi dari adanya tingkat dan kriteria yang ditentukan serta sesuai target yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Atiqah (2021) tentang Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif derajat desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai cukup efisien. Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah terhadap PSAP 02 terdapat 14 paragraf yang sesuai dan 3 paragraf belum sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2018) tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektif realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif dimana dapat dilihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2019) tentang Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas dari tahun 2015-2017 yaitu 93,42% yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar tidak efektif dan dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Kota Makassar yaitu efisien karena memiliki rasio 97,71%.

Tabel 2.3 Peneliti Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep, Rahmah, 2024.	Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah rasio efisiensi dan rasio efektivitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas realisasi anggaran mencapai 94% pada tahun 2019-2023 yang berada pada kategori efektif. Tingkat efisiensi anggaran menunjukkan hasil sangat efisien yaitu 94%.	Tentang analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan	Lokasi, waktu, dan tahun penelitian serta rentang tahun analisis yang digunakan yaitu 2019-2023
2.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020, Fasha, 2022.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mengenai analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah mencapai target, termasuk dalam kategori sangat efektif hal ini diketahui dari lebih besarnya jumlah yang terealisasi dengan dana yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda dinilai sangat efisien dikarenakan mampu melakukan penghematan anggaran. Hal ini terjadi dari adanya tingkat dan kriteria yang ditentukan serta sesuai target yang dicapai.	Rasio yang digunakan dalam analisis laporan realisasi anggaran berupa rasio efektivitas dan efisiensi. Rentang waktu dilakukan analisis selama 3 tahun.	Lokasi, waktu, dan tahun penelitian serta rentang tahun yang dianalisis yaitu 2017-2020.

Tabel 2.3 Lanjutan

3.	<p>Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2020, Atiqah, 2021.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menganalisis varian pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas PAD, analisis efisiensi dan kesesuaian penyajian laporan terhadap PSAP 02</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif derajat desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai cukup efisien. Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah terhadap PSAP 02 terdapat 14 paragraf yang sesuai dan 3 paragraf belum sesuai.</p>	<p>Analisis laporan realisasi anggaran berupa rasio efektivitas dan efisiensi</p>	<p>Lokasi, waktu dan tahun penelitian serta variabel kesesuaian penyajian laporan terhadap PSAP 02 dan juga beberapa analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini selain rasio efektivitas dan efisiensi</p>
4.	<p>Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, Rusdi, 2018.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik dokumenter, survey dan observasi</p>	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif dimana dapat dilihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang</p>	<p>Rasio analisis laporan realisasi anggaran menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas.</p>	<p>Lokasi penelitian, waktu, dan tahun penelitian</p>

			dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan.		
5.	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar, Zainuddin, 2019	Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan rasio efisiensi dan efektivitas	Rasio efektifitas dari tahun 2015-2017 yaitu 93,42% yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar tidak efektif dan dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Kota Makassar yaitu efisien karena memiliki rasio 97,71%.	Rasio analisis realisasi anggaran menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas.	Lokasi, waktu, tahun penelitian serta rentang tahun pelaporan yang digunakan

Sumber : Data diolah

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara

kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

1. Hubungan Rasio efektivitas dengan Kinerja Keuangan

Rasio efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, di mana pada konteks pemerintahan daerah tujuan tersebut diwujudkan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang telah direncanakan.

Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana target pendapatan daerah berhasil direalisasikan. Jika realisasi pendapatan mendekati atau melebihi target, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merencanakan dan mengelola potensi pendapatannya dengan baik. Artinya tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam aspek pendapatan, karena daerah dapat menjalankan fungsinya dalam menggali sumber pendapatan dan merealisasikannya secara optimal. Sebaliknya, efektivitas yang rendah menunjukkan kinerja keuangan yang lemah, karena target tidak tercapai, yang bisa berdampak pada pembiayaan program dan pelayanan publik.

Dengan demikian, rasio efektivitas memiliki hubungan yang signifikan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap rasio ini membantu memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pendapatan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis efektivitas menjadi salah satu unsur utama untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif (Mahsun, 2016; Mahmudi, 2019).

2. Hubungan Rasio efisiensi dengan Kinerja Keuangan

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan penggunaan anggaran yang hemat, tepat, dan tidak melebihi batas yang telah direncanakan. Menurut Mahmudi (2019), efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Pada konteks pemerintah daerah, efisiensi dievaluasi dari kemampuan pemerintah mengendalikan belanja agar tidak melebihi realisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rasio efisiensi menunjukkan seberapa hemat dan optimal pemerintah dalam menggunakan anggaran belanja terhadap pendapatan yang dimiliki. Jika belanja dapat direalisasikan secara efisien tanpa pemborosan, maka daerah menunjukkan kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini berarti tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dalam aspek pengeluaran, karena anggaran digunakan

sesuai prioritas, tidak berlebihan, dan tetap menghasilkan output pelayanan publik. Sebaliknya, tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, yang berarti kinerja keuangan kurang baik.

Dalam perspektif kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio efisiensi memiliki hubungan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan efisiensi menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan biaya seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Tingkat efisiensi yang baik menggambarkan bahwa pemerintah mampu menghindari pemborosan anggaran, mengelola kegiatan sesuai prinsip *value for money*, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa peningkatan biaya yang tidak proporsional.

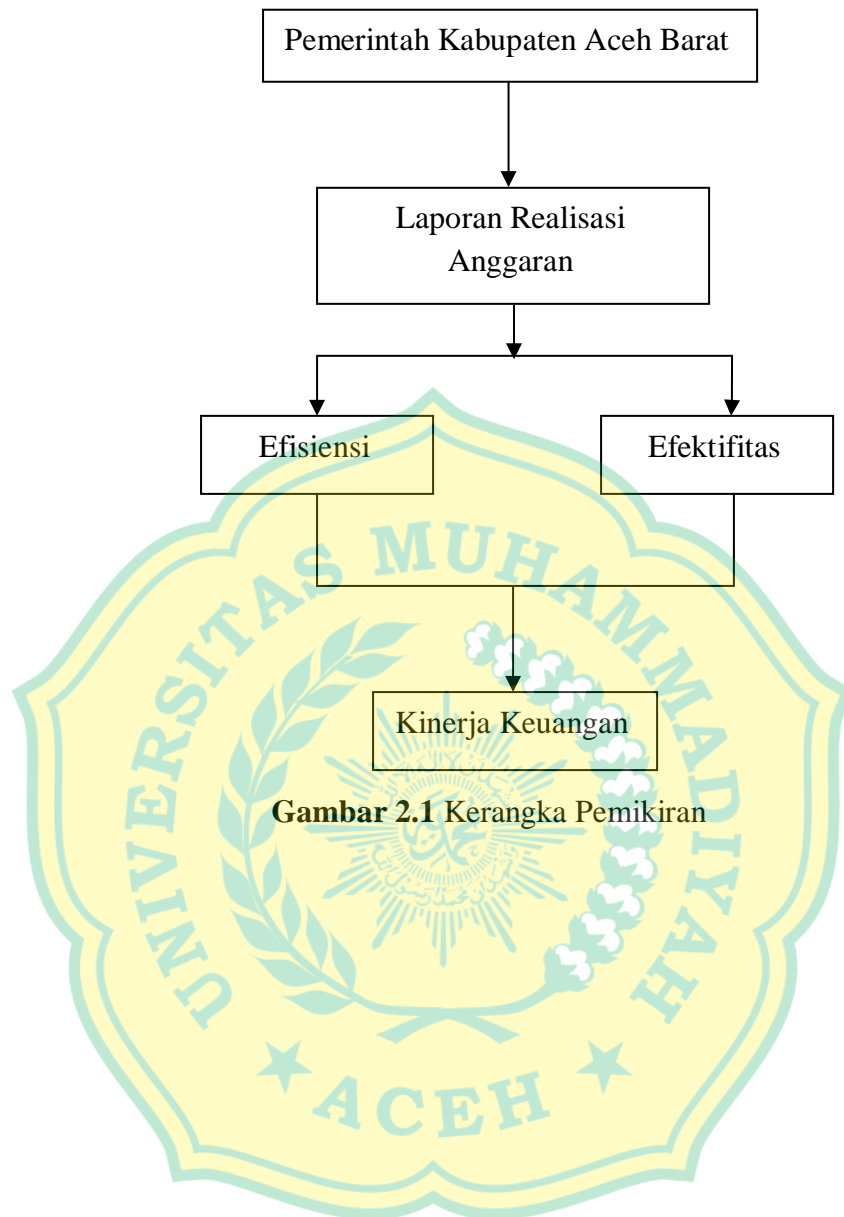
Sebaliknya, apabila rasio efisiensi menunjukkan angka yang tinggi atau jauh dari standar efisien, maka kondisi tersebut menandakan adanya inefisiensi pada pengelolaan belanja daerah. Inefisiensi dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti perencanaan anggaran yang kurang baik, pembengkakan biaya (*cost overrun*), pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, hingga lemahnya pengawasan internal.

Analisis rasio efisiensi menjadi penting untuk menilai apakah realisasi belanja daerah telah dilakukan secara ekonomis dan sesuai kebutuhan pembangunan. Belanja yang besar tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik apabila tidak diiringi dengan penggunaan yang efisien. Rasio efisiensi

yang rendah menunjukkan bahwa daerah mampu mengendalikan belanja dan memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk hasil yang optimal. Hal ini tentu mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, rasio efisiensi memiliki hubungan yang sangat erat dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap rasio ini memberikan gambaran mengenai manajemen anggaran pemerintah dalam aspek penghematan, optimasi penggunaan sumber daya, serta kemampuan menghindari pemborosan. Rasio efisiensi menjadi komponen penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah secara menyeluruh (Mahsun, 2016; Mahmudi, 2019).

Kerangka pemikiran ini sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkap dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif. Penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dari masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disajikan dalam bentuk angka.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan salah satu kantor pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian yang dilakukan membutuhkan kurang lebih 2 (dua) bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil dari observasi atau pengamatan langsung dari kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran, data lain yang diperlukan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan pustaka (*library research*). Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *webiste* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, menilai atau mengukur fenomena yang akan diamati. Instrumen yang akan digunakan dalam riset ini yaitu studi pustaka dan dokumentasi lapangan pada laporan keuangan BPKD Kabupaten Aceh Barat yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam mengelola hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan.

1. Analisis Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan realisasi anggaran, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah dengan sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis,

faktual dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara:

a. Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input. Output merupakan realisasi biaya untuk mempeleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Rumus Pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output (Biaya Perolehan PAD)}}{\text{Input (Realisasi PAD)}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi mengindikasikan semakin besar efisiensi dari realisasi pendapatan suatu daerah terhadap biaya perolehan PAD yang mengindikasikan kinerja yang efisien. Rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase
Sangat efisien	<60%
Efisien	60-80%
Cukup efisien	81-90%
Kurang efisien	91-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber : Zainuddin (2019)

b. Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran

Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Rasio efektivitas ulsebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihatdari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Standar efektivitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup efektif	80-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : Zainuddin (2019)



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Kabupaten ini memiliki peran strategis dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan wilayah Barat Aceh. Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Sebelah Selatan: Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Barat : Samudra Hindia

Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Kemudian Ibu kota Kabupaten Aceh Barat adalah Meulaboh, yang juga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta didukung oleh perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, Badan-badan daerah, Kecamatan dan gampong. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip “otonomi daerah” dan kekhususan Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mengembangkan potensi ekonomi daerah
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik
5. Melestarikan nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh

Kondisi Sosial dan Budayanya, saat ini masyarakat Aceh Barat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, syariat Islam, dan kearifan lokal. Kehidupan sosial masyarakat masih kuat dengan budaya gotong royong dan musyawarah. serta memiliki Potensi Daerah dibidang perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, pariwisata alam dan budaya serta pendidikan dan jasa.

4.1.2 Sejarah BPKD Kabupaten Aceh Barat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKD berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. BPKD Kabupaten Aceh Barat berlokasi di Jl. Gajah Mada Komplek Kantor Bupati, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

BPKD Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas BPKD berpedoman pada: Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun dan Peraturan Bupati Aceh Barat yang mengatur organisasi dan tata kerja perangkat daerah

BPKD Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas pokok:

1. Mengelola keuangan daerah
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK
3. Melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah
4. Mengelola kas daerah dan aset daerah
5. Membina dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah
4. Penyusunan laporan keuangan daerah
5. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
6. Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraannya BPKD memiliki Visi yaitu Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat yang transparan, akuntabel, dan profesional. serta memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah
2. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keuangan daerah
4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

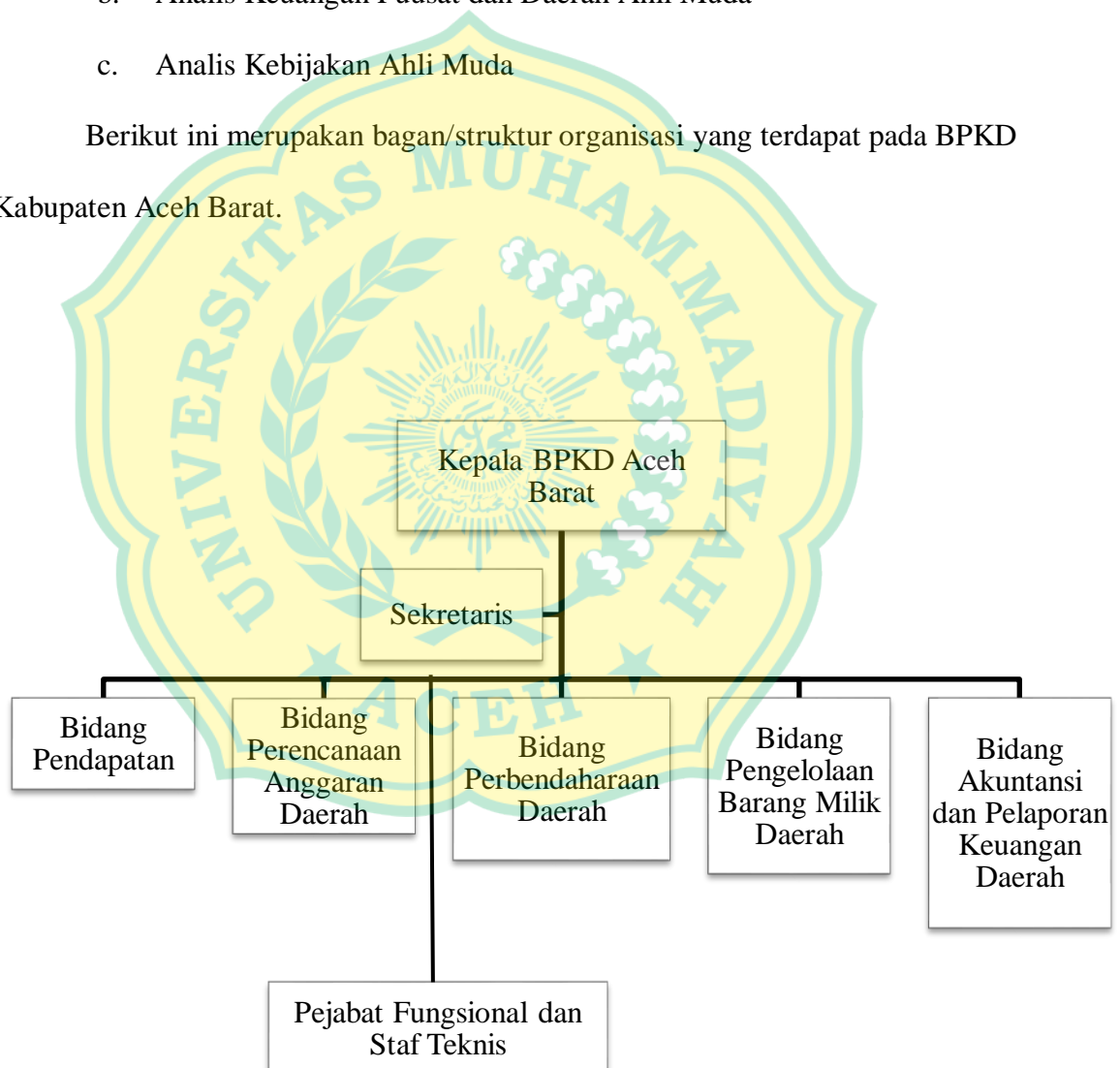
4.1.3 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Barat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengurus keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bertugas mengelola APBK, penyusunan laporan keuangan, dan asistensi teknis terkait keuangan untuk SKPK di wilayahnya, dengan kantor pusat di Kabupaten Aceh Barat. BPKD memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, termasuk pengelolaan APBK, penyusunan laporan keuangan, dan pembinaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat baik. Struktur organisasi BPKD Kabupaten Aceh Barat antara lain:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
2. Sekretaris, terdiri dari Kasubbag Umum, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, dan Perencana Ahli Muda.
3. Bidang-bidang Utama, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendapatan
 - b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

- c. Bidang Perbendaharaan Daerah
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Pejabat Fungsional dan Staf Teknis, yang terdiri dari :
- a. Penilai Pemerintah Ahli Muda
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Berikut ini merupakan bagan/struktur organisasi yang terdapat pada BPKD Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD Aceh Barat

4.2 Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas yaitu bagaimana cara pemerintah daerah khususnya memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Dan pengukuran kinerja keuangan ini lebih fokus pada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada dengan menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintah tidaklah sama dengan perhitungan dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi perusahaan, adapun analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio varians belanja sesuai dengan analisis yang digunakan, maka data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan BPKD Kabupaten Aceh Barat. Laporan keuangan yang peneliti gunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah.

4.2.1 Hasil Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Laporan Realisasi Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.550,65	1.381.559.675.657,21	1.330.736.825.406,15
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	1.456.397.024.846,37	1.355.619.103.188,43
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	1.662.230.194.336,44	1.575.087.638.450,08

Sumber : Laporan BPKD Kabupaten Aceh Barat (Data diolah 2026)

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa dalam setiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang suruh atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dan Rp 1.611.087.820.605,88. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk belanja daerah terjadi peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.662.230.194.336,44 anggarannya, dan untuk relaisasi belanja daerah jumlah anggarannya sebesar Rp . 1.575.087.638.450,08.

Jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 1.272.590.146.832,34 dengan persentase realisasi sebesar 104,49%, dengan jumlah belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp 1.330.736.825.406,15. Jumlah anggaran pada tahun 2023

sebesar Rp 1.361.137.805.877,00 dengan persentase realisasi sebesar 99,33%, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.355.619.103.188,43. Jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dengan persentase realisasi sebesar 112,08%, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.575.087.638.450,08.

4.2.2 Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran pendapatan dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mana semakin besar rasio maka semakin tidak efisien dan sebaliknya semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : Kurang dari 60%
- b. Efisien : 60 - 80%
- c. Cukup efisien : 81 - 90%
- d. Kurang efisien : 91 - 100%
- e. Tidak efisien : lebih dari 100%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.330.736.825.406,15}{1.329.776.515.550,65} \times 100\%$$

$$= 100,07\%$$

Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.355.619.103.188,43}{1.351.975.407.387,50} \times 100\% \\ &= 100,27\% \end{aligned}$$

Tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.575.087.638.450,08}{1.611.087.820.605,88} \times 100\% \\ &= 97,77\% \end{aligned}$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi, maka diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Ket
2022	Rp 1.330.736.825.406,15	Rp 1.329.776.515.550,65	100,07%	Tidak Efisien
2023	Rp 1.355.619.103.188,43	Rp 1.351.975.407.387,50	100,27%	Tidak Efisien
2024	Rp 1.575.087.638.450,08	Rp. 1.611.087.820.605,88	97,77%	Kurang Efisien

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 100,07% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien karena berada di antara 91 sampai dengan 100%. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil, mengindikasikan sedikit kekurangan efisiensi. Pada tahun 2023, rasio efisien mengalami peningkatan lagi sebesar 0,20% menjadi 100,27% yang termasuk dalam kriteria kurang tidak

efisien karena berada pada rentang lebih dari 100%, yang menunjukkan belanja pemerintah masih cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil yang mengindikasikan terjadinya kekurangan efisiensi.

Tahun 2024, rasio efisien mengalami penurunan sebesar 2,5% menjadi 97,77% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien karena berada di antara 91% sampai dengan 100% yang disebabkan usaha pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sementara pendapatan masih belum sepenuhnya stabil yang mengindikasikan sedikit kekurangan efisiensi. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dinamis dan kebijakan fiskal pemerintah yang beradaptasi dengan kebutuhan pemulihan ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan hasil uji rasio efisiensi rata-rata selama tiga tahun anggaran 2022-2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada pada tingkat efisiensi yang dapat dikatakan kurang efisien sampai dengan tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil mengelola anggaran dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Meskipun ada fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi atau lebih rendah, angka rata-rata rasio efisiensi anggaran menunjukkan upaya yang cukup stabil dalam mengelola perbandingan antara belanja dan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil menjaga anggaran agar tetap efisien dalam skala yang wajar meskipun ada tantangan ekonomi dan peningkatan pengeluaran yang diperlukan. Namun, rasio tersebut juga

menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan agar lebih efisien di masa mendatang.

$$\begin{aligned} \text{Total Rasio Efisiensi} &= \frac{4.261.443.567.045}{4.292.839.743.544} \times 100\% \\ &= 99,27\% \end{aligned}$$

4.2.3 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan secara efektif dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara melihat perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

- a. Sangat efektif : lebih dari 100%
- b. Efektif : 90 - 100%
- c. Cukup efektif : 80 - 90%
- d. Kurang efektif : 60 - 80%
- e. Tidak efektif : dibawah 60%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.329.776.515.550,65}{1.272.590.146.832,34} \times 100\% \\ &= 104,49\%\end{aligned}$$

Tahun 2023

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.351.975.407.387,50}{1.361.137.805.877,00} \times 100\% \\ &= 99,33\%\end{aligned}$$

Tahun 2024

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.611.087.820.605,88}{1.437.406.036.168,00} \times 100\% \\ &= 112,08\%\end{aligned}$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas, maka diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Ket
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.550,65	104,49%	Sangat Efektif
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	99,33%	Efektif
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2022-2024 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022 tingkat efektivitas dari anggaran pendapatan daerah berada pada persentase 104,49% yang menunjukkan

kinerja sangat efektif. Dengan tingkat efektivitas 104,49%, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mampu melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang relatif baik.

Tahun 2023 mengalami penurunan efektivitas menjadi 99,33%. Meskipun masih dalam kategori cukup efektif, penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran, baik dari sisi administrasi, teknis pengadaan, atau penyesuaian prioritas kegiatan. Penurunan efektivitas ini perlu menjadi perhatian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi ekonomi global, penurunan aktivitas sektor-sektor pendapatan utama, atau kebijakan fiskal yang kurang optimal pada tahun tersebut, sehingga anggaran tidak tercapai sesuai harapan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran, baik dari aspek administratif, teknis, maupun faktor eksternal seperti dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, sehingga realisasi pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target.

Tahun 2024 menunjukkan perbaikan efektivitas menjadi 112,08% dari tahun 2023 dan 2022. Kinerja ini kembali mendekati kategori sangat efektif, bahkan melebihi capaian pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran setelah penurunan yang terjadi pada 2023. Pemerintah daerah mampu meningkatkan serapan anggaran dan memperbaiki efektivitas pengelolaan program. Dengan demikian, perubahan setiap tahun ini menunjukkan dinamika ekonomi yang selalu berubah dan pengaruh kebijakan yang ditetapkan.

Meskipun begitu, dari tahun 2022-2024 tingkat efektivitas dilihat bahwa meskipun terdapat tantangan dalam beberapa tahun, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil menjalankan anggaran dengan cukup baik dalam periode tersebut. Hal ini juga mencerminkan adanya upaya yang harus terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan mengelola anggaran dengan lebih optimal, meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang berubah-ubah.

$$\begin{aligned} \text{Total Rasio Efektivitas} &= \frac{4.292.839.743.544}{4.071.133.988.877} \times 100\% \\ &= 105,45\% \end{aligned}$$

4.2.4 Analisis Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi perincian tentang anggaran entitas pelaporan serta realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Pengguna laporan dapat menggunakan data ini untuk menilai keputusan yang dibuat tentang distribusi pendanaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan total realisasi anggaran, yang membantu dalam menilai kinerja pemerintah dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

No.	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Rasio Efisiensi Belanja	99,27%	Kurang Efisien

2.	Rasio Efektivitas Belanja	105,45%	Sangat Efektif
----	---------------------------	---------	----------------

Sumber : Data Hasil Olahan

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Rasio Efisiensi

Penilaian analisis efisiensi dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penggunaan anggaran yang kurang efisien sampai dengan tidak efisien. Hal ini dibuktikan dengan persentase selama tiga tahun yang melebihi anggaran pendapatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan realisasi anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan daerah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kurang efisien dalam realisasi anggaran belanja daerah.

Nilai efisiensi sebesar 97,77% pada tahun 2024 menandakan bahwa realisasi belanja hampir menyamai pendapatan. Artinya meskipun tidak jauh melampaui pendapatan, belanja daerah relatif tinggi dibandingkan kemampuan pendapatan, yang menunjukkan potensi pemborosan atau penggunaan anggaran tanpa optimalisasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio efisiensi diatas 100% menunjukkan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang menandakan penggunaan anggaran tanpa optimalisasi.

Ketidakefisienan belanja dapat menjadi beban pada fiskal daerah, terutama jika realisasi belanja lebih besar dari pendapatan. Kondisi ini bisa menyebabkan defisit APBD atau tekanan likuiditas jika tidak diimbangi oleh penerimaan lain atau pinjaman. Selain itu, efisiensi pengeluaran sangat penting agar belanja publik

benar-benar produktif, memberikan nilai (*value for money*), dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu oleh Faisol (2018) pada kota Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran publik berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi belanja bukan hanya masalah penghematan, tetapi juga tentang mendorong hasil pembangunan yang bermanfaat bagi ekonomi lokal. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat efisiensinya rendah (kurang efisien) maka potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari belanja publik mungkin tidak maksimal. Belanja yang terlalu tinggi tanpa kontrol efisiensi bisa menghasilkan pemborosan yang sejatinya dapat digunakan untuk program lain atau dialihkan ke sektor produktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan efisiensi belanja pemerintah daerah adalah akuntabilitas, *good governance* (tata kelola yang baik), efisiensi sektor spesifik, distribusi dan alokasi belanja. Penelitian oleh Rahayu dan Khoirunrofik (2018), menemukan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan *non-linear* dengan efisiensi pengeluaran daerah. Pada titik tertentu, peningkatan akuntabilitas tidak selalu menaikkan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mungkin memiliki struktur pengawasan atau akuntabilitas yang belum optimal, atau terdapat inefisiensi dalam manajemen internal, meskipun laporan pengawasan mungkin bagus.

Selain itu, penelitian oleh Wardhani, Rossieta & Martani (2017), menunjukkan bahwa meskipun belanja publik bisa besar, jika tata kelolanya

buruk, maka hasil pembangunan tidak optimal dan belanja bisa boros tanpa hasil maksimal. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, hal ini berarti perlu perbaikan manajemen anggaran, transparansi, dan pertanggungjawaban agar setiap rupiah belanja memberikan *outcome* yang nyata.

Penelitian lainnya oleh Mukti & Auwalin (2020) dalam *Efficiency Analysis of Regional Government Expenditure on Development* menggunakan pendekatan DEA dan Malmquist Index untuk mengukur efisiensi pembangunan daerah. Jika alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat terlalu banyak diarahkan pada belanja rutin (gaji, administrasi) dan kurang pada belanja produktif (seperti infrastruktur, layanan publik), maka efisiensi akan rendah.

Dalam meningkatkan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan audit internal, memperbaiki akuntabilitas, mengalokasikan lebih banyak ke belanja produktif, dan melakukan pemantauan berkala. Sehingga, belanja daerah tidak hanya ditekan (penghematan), tetapi diarahkan agar menghasilkan manfaat maksimal (*value for money*) dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

4. 3. 2 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan analisis efektivitas pendapatan daerah, maka dapat dilihat mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif. Dapat dilihat dari rasio perhitungannya sebesar 99,33% sampai dengan 112,08%, maka penggunaan anggaran pendapatan selama tiga tahun anggaran tersebut termasuk kategori efektif sampai dengan sangat efektif, hal ini dapat diartikan manajemen

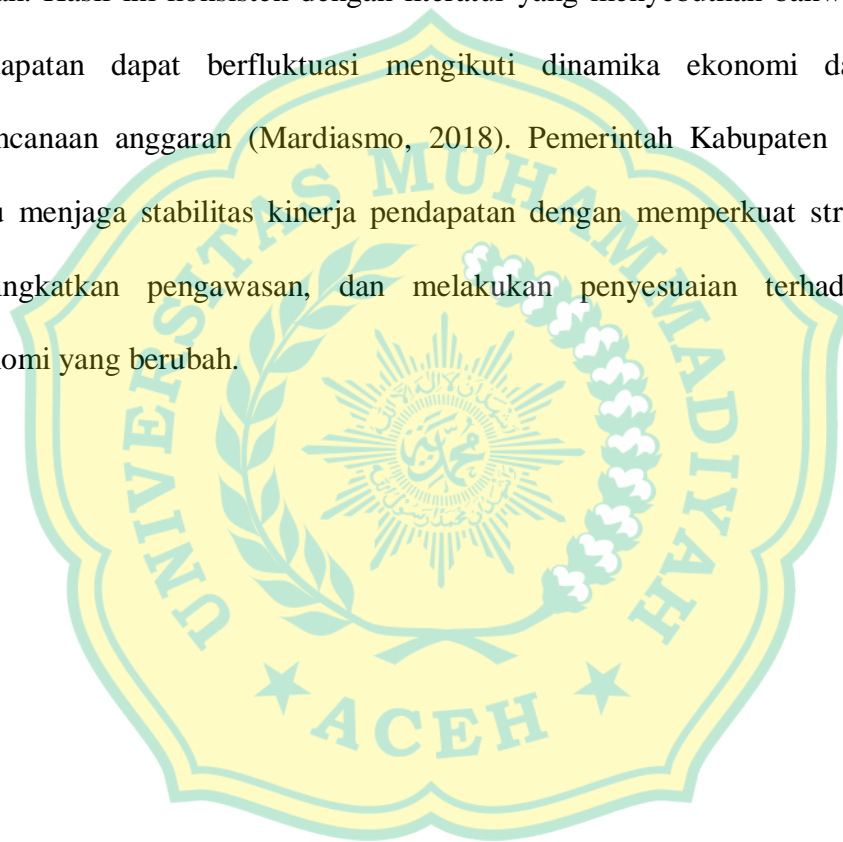
penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai tujuan dan target realisasinya dimana semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja yang dimaksud. Batas atas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dari sasaran seperti yang direncanakan, dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2024 sebesar 112,08% dan rasio terendah pada tahun 2023 sebesar 99,33%.

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Apabila telah mencapai tujuan, maka telah berjalan secara efektif dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara melihat perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan rasio efektivitas pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan target pendapatan dalam jangka menengah, secara umum kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren positif, dan kemampuan adaptasi fiskal pemerintah daerah cukup baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek meningkatkan jumlah anggaran PAD untuk tahun 2022. Dan jumlah realisasi PAD tahun 2022 melebihi jumlah capaian yang ditetapkan. Sehingga diperoleh angka 102,33 untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2022. Angka ini masuk ke kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, rasio efektivitas selama tahun 2020-2022 mengalami naik turun namun masih berada di atas 90%.

Berdasarkan angka pada rasio ini dikategorikan ke kelompok cukup dengan rentang nilai 90-99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah mendekati efektif (Arini & Zulvianira, 2024).

Secara keseluruhan, rata-rata efektifitas 105,45% menempatkan Kabupaten Aceh Barat dalam kinerja sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa efektifitas pendapatan dapat berfluktuasi mengikuti dinamika ekonomi dan kualitas perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu menjaga stabilitas kinerja pendapatan dengan memperkuat strategi fiskal, meningkatkan pengawasan, dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang berubah.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Menurut hasil perhitungan rasio efisiensi realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efisiensi berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Tahun 2022, rasio efisiensi sebesar 100,07% menunjukkan bahwa realisasi belanja sedikit lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien. Tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 100,27%, yang menandakan tingkat ketidakefisienan yang semakin tinggi. Pada tahun 2024, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 97,77%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja dan upaya peningkatan pendapatan, meskipun secara keseluruhan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Secara keseluruhan, fluktuasi rasio efisiensi selama periode 2022–2024 dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi daerah dan kebijakan fiskal pemerintah yang berfokus pada pemulihan ekonomi serta pembangunan jangka panjang.

2. Rasio keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan rasio efektivitas dari tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efektivitas anggaran mengalami fluktuasi yang berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas sebesar 104,49% menunjukkan kinerja sangat efektif, yang menandakan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Tahun 2023, efektivitas menurun menjadi 99,33%, yang masih tergolong cukup efektif. Tahun 2024, tingkat efektivitas kembali meningkat signifikan menjadi 112,08%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan serapan dan optimalisasi sumber pendapatan.

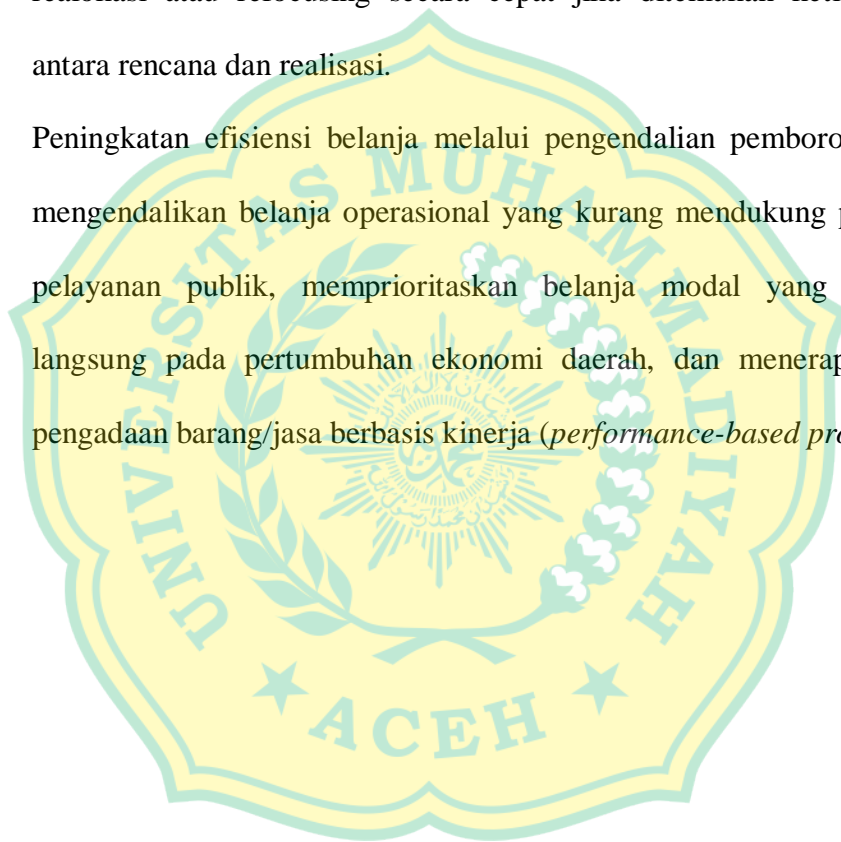
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Meskipun efektivitas pendapatan daerah tergolong sangat efektif, pemerintah daerah perlu memastikan perencanaan pendapatan semakin realistis, akurat, dan berbasis potensi riil daerah. Di sisi lain, perencanaan belanja harus memperhatikan prinsip *value for money*, agar belanja tidak hanya terserap tinggi tetapi juga memberikan manfaat maksimal. Penyusunan RKA-

SKPD dan RKPD perlu lebih berbasis data dan analisis kebutuhan yang mendalam.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat disarankan agar melakukan evaluasi triwulan atau semesteran terhadap serapan anggaran, mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengalami pembengkakan biaya, dan melakukan realokasi atau refocusing secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.
3. Peningkatan efisiensi belanja melalui pengendalian pemborosan dengan mengendalikan belanja operasional yang kurang mendukung peningkatan pelayanan publik, memprioritaskan belanja modal yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, dan menerapkan sistem pengadaan barang/jasa berbasis kinerja (*performance-based procurement*).



DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R.D. 2023. *Kajian SiLPA APBD Pemerintah Daerah di Aceh: Benarkah Akibat Terhambatnya Penyerapan APBD?*. Djpb Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/847-berita/opini/4054-kajian-silpa-apbd-pemerintah-daerah-di-aceh-benarkah-akibat-terhambatnya-penyerapan-apbd.html?utm_source=chatgpt.com
- Alhabsi, R.H., Nuwun P., & Risma. 2023. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021*. Jurnal Riset Akuntansi.
- Bastian. 2017. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* Jakarta : Penerbit Erlangga
- Cahyono, D., & Yustrianthe, R. H. 2019. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
- Darmawan, D. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Dien, et al. 2015. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Fahmi. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Ginting, E., Shellya, E.P, et al. 2024. *Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2023*. Hakim : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2, No.1.
- Haigustina. 2023. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna*. Skripsi. STIE Pembangunan Tanjung Pinang.
- Halim, A. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2020. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, Vol. 4 Nomor 1. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : IAI.
- Iskandar, T.D. 2024. *Aceh Barat realisasikan pendapatan daerah Rp1,35 T di 2023*. Antara Aceh. <https://aceh.antaranews.com/berita/362076/aceh-barat-realisasikan-pendapatan-daerah-rp135-t-di-2023?utm>
- Ismail. 2024. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene*. Skripsi. IAIN Pare Pare.
- Karina. 2019. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. AkunNas, Vol. 13, No.1.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2018. *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Milla. 2021. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Kramat*. Tugas Akhir Politeknik Harapan Bersama.
- Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nordiawan, D. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurfadillah, A.I. 2018. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- PMDN No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Prasetya. 2019. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Putra, A.F., & Novia D. 2020. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman)*. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Rahmah, Miftahul. 2024. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep*. (Skripsi). Prodi Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmawati, N. 2020. *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis.
- Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalis Indonesia.
- Ratmono. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Riadi, Muchlisin. 2021. *Pengertian, Fungsi, Jenis dan Metode Penyusunan Anggaran*. https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-fungsi-jenis-dan-metode-penyusunan-anggaran.html?utm_source=chatgpt.com
- Sangadji. 2019. *Pengertian Anggaran*. <https://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1342/11.%20BAB%20II.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Sari, P., & Wulandari, D. 2021. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja*. Jurnal Akuntabilitas Publik.
- Sariono, E., & Marison S. 2024. *Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.
- Susanto, H. 2018. *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. *Distribusi : Journal of Management and Business*.
- Umar. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014*. Jurnal Ilman.

Zainuddin, Dede. 2019. *Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar*. (Skripsi). Prodi Akuntansi Universitas Bosowa.



LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2022		REALISASI PENERIMAAN	Persentase (%)
		(Sebelum Perubahan) Rp.	(Setelah Perubahan) Rp.		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.356.183.186.834,00	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.550,65	104,49
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.990.696.646,00	138.160.850.667,34	143.495.607.688,70	103,86
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	23.723.612.758,00	28.123.612.758,00	29.502.893.790,17	104,90
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8.839.175.010,00	7.513.435.010,00	6.767.402.443,54	90,07
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.718.030.043,00	104,90
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	92.427.908.878,00	85.336.762.316,00	90.587.970.183,81	106,15
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.112.867.909.108,00	1.128.308.296.165,00	1.180.357.907.861,95	104,61
4 2 1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.081.396.097.384,00	1.005.631.872.276,00	1.056.051.584.830,00	105,01
4 2 1 1	Dana Perimbangan	747.260.964.800,00	754.936.045.276,00	782.532.000.830,00	103,66
4 2 1 2	Dana Insentif Daerah	7.200.869.000,00	16.287.444.000,00	36.449.450.025,27	104,68
4 2 1 3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	92.525.880.584,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 5	Dana Desa	234.408.383.000,00	234.408.383.000,00	234.408.383.000,00	100,00
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.471.811.724,00	122.676.423.889,00	124.306.323.031,95	101,33
4 2 2 1	Pendapatan Bagi Hasil	31.471.811.724,00	34.819.550.882,00	36.449.450.025,27	104,68
4 2 2 2	Bantuan Keuangan	0,00	87.856.873.007,00	87.856.873.006,68	100,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	650.000.000,00	6.121.000.000,00	5.923.000.000,00	101,33
4 3 1	Pendapatan Hibah	650.000.000,00	6.121.000.000,00	5.923.000.000,00	96,77
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp. 1.381.559.675.657,21** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.330.736.825.406,15** atau sebesar **96,32%**.

Adapun secara rinci target dan realisasi belanja sebagaimana tabel dibawah :

KODE REKENING	URAIAN BELANJA	ANGGARAN 2022		REALISASI Rp.	%
		(Sebelum Perubahan) Rp.	(Setelah Perubahan) Rp.		
5	BELANJA	1.294.517.871.076	1.381.559.675.657,21	1.330.736.825.406,15	96,32
5 1	BELANJA OPERASI	768.369.785.491	793.983.599.187,71	770.786.439.678,15	97,08
5 1 1	Belanja Pegawai	503.457.718.806	502.685.319.333,00	491.142.213.419,00	97,70
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	219.592.186.043	239.332.795.221,37	226.271.340.738,26	94,54
5 1 3	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Subsidi	184.000.000	1.384.000.000,00	1.383.996.000,00	100,00
5 1 5	Belanja Hibah	32.298.980.642	37.762.219.050,00	39.283.616.059,00	104,03
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	12.836.900.000	12.819.265.583,34	12.705.273.461,89	99,11
5 2	BELANJA MODAL	216.772.833.008	259.741.277.836,00	251.666.614.320,00	96,89
5 2 1	Belanja Tanah	2.836.000.000	2.836.000.000,00	2.835.847.450,00	99,99
5 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	31.243.272.057	43.485.458.458,00	42.439.343.867,00	97,59
5 2 3	Belanja Bangunan dan Gedung	37.003.641.262	39.271.459.810,00	37.824.360.485,00	96,32
5 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.416.586.954	170.583.121.233,00	165.009.709.410,00	96,73
5 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	273.332.735	3.565.238.335,00	3.557.353.108,00	99,78
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.264.683.200	20.881.710.256,50	3.421.493.608,00	16,39
5 3 1	Belanja Tak Terduga	4.264.683.200	20.881.710.256,50	3.421.493.608,00	16,39
5 4	TRANSFER	305.110.569.377	306.953.088.377,00	304.862.277.800,00	99,32
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	3.256.278.777	3.563.704.777,00	3.327.568.700,00	93,37
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	301.854.290.600	303.389.383.600,00	301.534.709.100,00	99,39
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(51.009.265.322)	(108.969.528.824,87)	(960.309.855,50)	0,88

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Mengenai target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 sebagaimana pada tabel dibawah :

URAIAN	ANGGARAN 2022		REALISASI (Rp)	%
	(Sebelum Perubahan) Rp.	(Setelah Perubahan) Rp.		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.009.265.322,00	108.969.528.824,87	108.969.528.824,87	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.009.265.322,00	108.969.528.824,87	108.969.528.824,87	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan NETTO	51.009.265.322,00	108.969.528.824,87	108.969.528.824,87	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	108.969.528.824,87	0,00

E. INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11.6301.A Tahun 2022, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 memperoleh nilai 47,21 dengan status Inovatif.

Adapun rekap inovasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA INOVASI	PELAKSANA	KEBERLANJUTAN
1	Klik n Kring	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
2	SITRAB (Sistem Informasi Tata Ruang Aceh Barat)	Dinas PUPR	2022
3	AMUNISI LENGKAP (Ayo Imunisasi Dasar Lengkap)	Puskesmas Meureubo	2022
4	GERANAT (Gerakan Anti TB)	Puskesmas Meureubo	2022
5	MELAMAR (Mendaftarkan BPJS Bayi Baru Lahir Masyarakat Meureubo)	Puskesmas Meureubo	2022

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.



Meulaboh, 21 Maret 2023
PL. BUPATI ACEH BARAT,

Drs. MAHDI



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

*Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022*

11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN	G.5.1.1	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	99,33	1.329.776.515.550,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1	174.589.190.408,00	166.697.390.224,50	95,48	143.495.607.688,70
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	26.159.492.758,00	26.358.265.478,79	100,76	29.502.893.790,17
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	13.571.132.960,00	7.618.415.157,74	56,14	6.767.402.443,54
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	4.439.083.574,00	4.996.756.426,00	112,56	4.718.030.043,00
Pendapatan Zakat - LRA	G.5.1.1.1.4	12.500.000.000,00	10.506.547.026,49	84,05	11.919.311.228,18
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.1.1.1.5	117.919.481.116,00	117.217.406.135,48	97,93	90.587.970.183,81
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2	1.185.648.615.469,00	1.184.390.509.510,00	99,89	1.180.357.907.861,95
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	G.5.1.1.2.1	1.104.094.752.657,00	1.108.197.252.350,00	100,37	1.056.051.584.830,00
Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.1.1	835.909.065.657,00	840.011.565.350,00	100,49	782.532.000.830,00
Dana Insentif Daerah (DID)	G.5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	39.111.201.000,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	G.5.1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	G.5.1.1.2.1.4	231.144.301.000,00	231.144.301.000,00	100,00	234.408.383.000,00
Insentif Fiskal	G.5.1.1.2.1.5	37.041.386.000,00	37.041.386.000,00	100,00	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	G.5.1.1.2.2	81.553.862.812,00	76.193.257.160,00	93,43	124.306.323.031,95
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.2.1	46.817.385.834,00	41.456.690.182,00	88,55	36.449.450.025,27
Bantuan Keuangan	G.5.1.1.2.2.2	34.736.476.978,00	34.736.566.978,00	100,00	87.856.873.006,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3	900.000.000,00	887.507.653,00	98,61	5.923.000.000,00
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	900.000.000,00	887.507.653,00	98,61	5.923.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	G.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	G.5.1.2	1.456.397.024.846,37	1.355.619.103.188,43	93,08	1.330.736.825.406,15
BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1	905.478.421.602,00	830.599.987.687,63	91,73	770.786.439.678,15
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	570.321.741.194,00	515.827.796.498,10	90,45	491.142.213.419,00
Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	271.647.214.346,00	249.787.837.226,53	91,95	226.271.340.738,26
Belanja Bunga	G.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	G.5.1.2.1.4	2.283.290.344,00	2.274.949.200,00	99,63	1.383.996.000,00
Belanja Hibah	G.5.1.2.1.5	50.157.385.046,00	51.700.214.763,00	103,08	39.283.616.059,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.6	11.068.790.672,00	11.009.190.000,00	99,46	12.705.273.461,89
BELANJA MODAL	G.5.1.2.2	235.708.190.263,00	212.637.551.225,80	90,21	251.666.614.320,00
Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	4.949.155.000,00	2.027.975.844,00	40,98	2.835.847.450,00
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.2	36.691.498.752,00	35.027.840.042,80	95,47	42.439.343.867,00
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	26.866.437.120,00	25.117.520.213,00	93,49	37.824.360.485,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	G.5.1.2.2.4	163.538.179.513,00	146.620.906.038,00	89,66	165.009.709.410,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	3.662.919.878,00	3.843.309.088,00	104,92	3.557.353.108,00
BELANJA TAK TERDUGA	G.5.1.2.3	3.147.668.709,37	600.000.000,00	19,06	3.421.493.608,00
TRANSFER	G.5.1.3	312.062.744.272,00	311.781.564.275,00	99,91	304.862.277.800,00
TRANSFER BAGI HASIL	G.5.1.3.1	3.973.062.572,00	3.712.949.200,00	93,45	3.327.568.700,00
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	G.5.1.3.1.1	2.615.949.276,00	2.577.622.175,00	98,53	2.577.008.000,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	G.5.1.3.1.2	1.357.113.296,00	1.135.327.025,00	83,66	750.560.700,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	G.5.1.3.2	308.089.681.700,00	308.068.615.075,00	99,99	301.534.709.100,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	G.5.1.3.2.1	308.089.681.700,00	308.068.615.075,00	99,99	301.534.709.100,00
SURPLUS/DEFISIT	G.5.1.4	(95.259.218.969,37)	(3.643.695.800,93)	3,83	(960.309.855,50)
PEMBIAYAAN	G.5.1.5	95.259.218.969,37	107.759.218.969,37	113,12	108.969.528.824,87
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.5.1	108.009.218.969,37	108.009.218.969,37	100,00	108.969.528.824,87
Penggunaan SiLPA	G.5.1.5.1.1	108.009.218.969,37	108.009.218.969,37	100,00	108.969.528.824,87
Penerimaan Pinjaman – Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD		0,00	287.228.044,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		529.222.000,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja		532.472.300,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		95.475.570.621,90	96.220.335.090,90	100,78	108.969.528.824,87
Sisa Belanja Lainnya		11.471.954.047,47	11.501.655.834,47	100,26	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.5.2	12.750.000.000,00	250.000.000,00	1,96	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	G.5.1.5.2.1	12.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.1.5.2.2	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	G.5.1.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	G.5.1.5.3	95.259.218.969,37	107.759.218.969,37	113,12	108.969.528.824,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	G.5.1.6	(0,00)	104.115.523.168,44	0,00	108.009.218.969,37

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH BARAT

DRS. MAHDI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



PEMERINTAHAN KAB. ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08	1.351.975.407.387,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.621.655.202,00	173.979.064.090,88	106,98	166.697.390.224,50
4.1.01	Pajak Daerah	26.159.492.758,00	27.763.847.765,35	106,13	26.358.265.478,79
4.1.01.06	Pajak Hotel	158.380.000,00	122.487.500,00	77,33	127.246.700,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	158.380.000,00	122.487.500,00	77,33	126.746.700,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	158.380.000,00	122.487.500,00	77,33	126.746.700,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisata Pariwisata	1.500.000,00	2.750.000,00	183,33	0,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisata Pariwisata	1.500.000,00	2.750.000,00	183,33	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.008.676.253,00	7.130.809.937,00	177,89	5.319.775.894,40
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.008.676.253,00	7.130.809.937,00	177,89	4.817.021.286,40
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.008.676.253,00	7.130.809.937,00	177,89	4.817.021.286,40
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	32.000.000,00	9.462.000,00	29,56	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	32.000.000,00	9.462.000,00	29,56	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafe dan Sejenisnya	48.000.000,00	78.482.174,00	163,50	120.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafe dan Sejenisnya	48.000.000,00	78.482.174,00	163,50	120.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.600.000.000,00	4.083.292.287,00	113,42	502.634.608,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.600.000.000,00	4.083.292.287,00	113,42	502.634.608,00
4.1.01.09	Pajak Hiburan	220.000.000,00	508.896.021,00	231,31	239.945.566,90
4.1.01.09.02	Pajak Paparan Kesenian/Musik/Tari/Busana	205.000.000,00	394.786.521,00	192,58	206.843.697,40
4.1.01.09.02.0001	Pajak Paparan Kesenian/Musik/Tari/Busana	205.000.000,00	394.786.521,00	192,58	206.843.697,40
4.1.01.09.09	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Karting/Kasino	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Karting/Kasino	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.09	Pajak Partai Pijak, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Partai Pijak, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	3.899.500,00	77,99	33.101.869,50
4.1.01.09.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	3.899.500,00	77,99	33.101.869,50
4.1.01.09	Pajak Reklame	470.000.000,00	379.299.368,50	80,70	476.385.973,37
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	395.000.000,00	329.182.681,50	83,31	416.169.374,37
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	395.000.000,00	329.182.681,50	83,31	416.169.374,37
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Lain	50.000.000,00	50.116.687,00	100,23	60.216.599,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Lain	50.000.000,00	50.116.687,00	100,23	60.216.599,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Sektor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Sektor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.518.676.253,00	13.856.992.048,00	110,69	12.524.482.942,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.518.676.253,00	13.856.992.048,00	110,69	12.524.482.942,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.518.676.253,00	13.856.992.048,00	110,69	12.524.482.942,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00	6.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00	6.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00	6.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	61.066.632,00	50,88	149.430.506,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	61.066.632,00	50,88	149.430.506,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	61.066.632,00	50,88	149.430.506,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00	20.000.000,00	44,44	36.550.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00	20.000.000,00	44,44	36.550.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00	20.000.000,00	44,44	36.550.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.511.323.747,00	1.206.923.656,75	79,85	811.502.076,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.141.323.747,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.141.323.747,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	370.000.000,00	1.206.923.656,75	326,19	811.502.076,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	370.000.000,00	1.206.923.656,75	326,19	811.502.076,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.920.936.505,00	1.162.712.962,00	60,52	1.426.651.234,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.920.936.505,00	1.162.712.962,00	60,52	1.426.651.234,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.920.936.505,00	1.162.712.962,00	60,52	1.426.651.234,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.16	Bisa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.500.000.000,00	3.426.119.640,10	76,13	5.240.294.586,12
4.1.01.16.01	BPHTB-Permindahan Hak	4.500.000.000,00	3.426.119.640,10	76,13	5.240.294.586,12
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Permindahan Hak	4.500.000.000,00	3.426.119.640,10	76,13	5.240.294.586,12
4.1.02	Retribusi Daerah	10.443.502.000,00	8.317.068.836,66	79,63	7.618.415.157,74
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.262.377.916,00	6.305.261.731,66	76,31	5.718.626.147,74
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.222.770.000,00	4.086.927.529,66	78,25	3.542.433.187,74
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.222.770.000,00	4.086.927.529,66	78,25	3.442.968.187,74
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	0,00	0,00	99.465.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.900.000.000,00	1.531.001.202,00	80,57	743.460.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.900.000.000,00	1.531.001.202,00	80,57	743.460.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	162.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	162.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	989.607.916,00	537.333.000,00	54,29	641.179.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	138.555.059,00	99.433.000,00	71,76	89.029.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	851.052.857,00	437.900.000,00	51,45	552.150.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	102.560.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	102.560.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	343.225.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	343.225.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang	0,00	0,00	0,00	33.340.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	33.340.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	150.428.960,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	150.428.960,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.068.124.064,00	1.654.501.025,00	80,00	1.580.781.140,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.471.252.778,00	1.076.141.025,00	73,14	933.835.140,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.000.320.779,00	760.593.025,00	76,03	690.564.660,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	45.000.000,00	52.997.000,00	117,77	14.046.480,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	25.000.000,00	12.773.000,00	51,09	21.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	70.932.000,00	75.428.000,00	106,33	61.834.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	330.000.000,00	174.390.000,00	52,83	145.330.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	367.271.305,00	403.000.000,00	109,72	382.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrolkan	367.271.305,00	403.000.000,00	109,72	382.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	74.000.000,00	71.030.000,00	95,98	207.238.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	0,00	133.908.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	74.000.000,00	71.030.000,00	95,98	73.330.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	42.350.000,00	42,35	51.850.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	42.350.000,00	42,35	51.850.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabahan	15.600.000,00	10.468.000,00	67,35	5.868.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabahan	15.600.000,00	10.468.000,00	67,35	5.868.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diuar Badan Jalan	40.000.000,00	51.312.000,00	128,78	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diuar Badan Jalan	40.000.000,00	51.312.000,00	128,78	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	113.000.000,00	357.306.000,00	316,20	319.007.870,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	275.867.870,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	275.867.870,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	43.140.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pembayaran Izin Kegiatan Usaha Perangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	43.140.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Perizinan Bangunan Gedung	113.000.000,00	357.306.000,00	316,20	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	113.000.000,00	357.306.000,00	316,20	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.749.184.366,00	3.875.307.093,27	103,36	4.996.756.426,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.749.184.366,00	3.875.307.093,27	103,36	4.996.756.426,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00	4.996.756.426,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00	4.996.756.426,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.749.184.366,00	3.875.307.093,27	103,36	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.749.184.366,00	3.875.307.093,27	103,36	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.269.476.078,00	134.022.840.385,60	109,61	127.723.903.161,97
4.1.04.01	Hasil Perjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	22.067.233,32	7,35	480.857.965,32
4.1.04.01.02	Hasil Perjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	22.067.233,32	7,35	480.857.965,32

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	480.857.965,32
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000,00	22.067.233,32	7,35	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	393.332.206,18	39,33	265.051.351,47
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	393.332.206,18	39,33	265.051.351,47
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	393.332.206,18	39,33	265.051.351,47
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.700.000.000,00	7.295.407.305,39	197,17	3.065.782.096,85
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00	7.295.407.305,39	197,17	3.065.782.096,85
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00	7.295.407.305,39	197,17	3.065.782.096,85
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	2.516.026.037,71	167,73	860.645.123,63
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000.000,00	2.516.026.037,71	167,73	860.645.123,63
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000.000,00	2.516.026.037,71	167,73	860.645.123,63
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	114.294.519,00	114,29	28.594.813,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	114.294.519,00	114,29	28.594.813,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	114.294.519,00	114,29	28.594.813,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	161.174.408,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	161.174.408,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	161.174.408,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0000	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.149.476.078,00	9.394.229,00	0,81	35.937.574,17
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	26.911.437,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	26.911.437,00
4.1.04.15.14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	1.149.476.078,00	9.394.229,00	0,81	25.546.137,17
4.1.04.15.14.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi MRP	0,00	0,00	0,00	736,84
4.1.04.15.14.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Internal MRP	1.149.476.078,00	9.394.229,00	0,81	25.545.400,33
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.1.04.15.15.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Pakaian Suku Cadang/Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.1.04.16	Pendapatan SLUD	102.000.000.000,00	112.758.693.213,35	110,54	99.428.022.909,04
4.1.04.16.02	Pendapatan SLUD dari Jasa Layanan	102.000.000.000,00	112.758.693.213,35	110,54	89.808.660.010,56
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan SLUD dari Jasa Layanan	102.000.000.000,00	112.758.693.213,35	110,54	89.808.660.010,56
4.1.04.16.04	Pendapatan SLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	233.018.087,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan SLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	233.018.087,00
4.1.04.16.06	Pendapatan SLUD dari Lain-Lain Pendapatan SLUD yang Sah	0,00	0,00	0,00	9.386.344.811,48
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan SLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh SLUD	0,00	0,00	0,00	9.386.344.811,48
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (KJN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	13.032.494.302,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi (KJN) pada FKTP	0,00	0,00	0,00	13.032.494.302,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi (KJN) pada FKTP	0,00	0,00	0,00	13.032.494.302,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	12.500.000.000,00	10.752.451.233,85	86,01	10.506.547.026,49
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	12.500.000.000,00	10.752.451.233,85	86,01	10.506.547.026,49
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	12.500.000.000,00	10.752.451.233,85	86,01	9.722.976.185,49
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	0,00	0,00	0,00	783.570.841,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	162.621.655.202,00	173.979.064.090,88	106,98	166.697.390.224,50
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.258.793.168.710,00	1.408.162.625.746,00	111,86	1.184.390.509.510,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.217.528.543.259,00	1.366.432.316.388,00	112,23	1.108.197.252.350,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	37.695.791.334,00	37.714.798.853,00	100,05	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	37.695.791.334,00	37.714.798.853,00	100,05	0,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	37.695.791.334,00	37.714.798.853,00	100,05	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	924.257.976.925,00	1.073.342.742.535,00	116,10	840.011.565.350,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	144.006.737.000,00	301.194.177.000,00	209,15	120.187.184.679,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.616.764.000,00	29.616.764.000,00	100,00	7.236.425.066,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.044.547.000,00	6.044.547.000,00	100,00	8.556.279.406,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOFDN	68.705.000,00	68.705.000,00	100,00	36.647.600,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.195.753.000,00	1.202.755.000,00	100,58	97.772.524,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	85.256.000,00	85.256.000,00	100,00	256.163.965,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	148.673.000,00	148.673.000,00	100,00	153.929.170,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.962.000,00	8.962.000,00	100,00	9.272.113,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	474.606.000,00	495.703.000,00	104,44	536.037.837,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	97.689.615.000,00	254.873.798.000,00	260,90	93.452.194.624,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Rutan (PSDR)	24.842.000,00	0,00	0,00	8.231.932.563,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.384.982.000,00	1.384.982.000,00	100,00	1.620.539.811,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	7.264.012.000,00	7.264.012.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	602.391.336.000,00	600.719.250.955,00	99,72	562.859.275.685,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	602.391.336.000,00	600.719.250.955,00	99,72	562.859.275.685,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.761.814.000,00	70.117.977.876,00	99,09	53.986.632.826,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	878.059.000,00	870.679.700,00	99,28	438.006.300,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.342.481.000,00	6.341.338.000,00	99,98	3.328.299.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.575.881.000,00	4.573.125.000,00	99,94	3.316.162.750,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perguruan Tinggi Daerah	521.536.000,00	520.809.100,00	99,89	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perugasan-Penguatan Intervensi Stunting	943.981.000,00	3.216.907.924,00	340,78	11.244.197.587,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.749.088.000,00	1.737.665.300,00	99,34	943.351.295,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	1.335.995.200,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengisian-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Peralana Fisik Dasar/Pembangunan Pertanian	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan	10.906.371.000,00	17.832.846.916,00	163,56	9.965.665.350,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Perugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.536.480.750,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.060.305.000,00	11.577.680.449,00	127,78	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Perugasan	0,00	0,00	0,00	10.500.089.075,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.168.306.000,00	7.168.306.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Perugasan	0,00	0,00	0,00	6.014.787.725,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Perugasan	2.574.725.000,00	2.566.881.400,00	99,69	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.043.398.000,00	13.511.557.407,00	84,21	1.363.595.794,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	107.098.089.925,00	101.111.334.704,00	94,41	102.978.472.160,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.994.070.000,00	23.392.575.979,00	99,99	23.173.081.056,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.570.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.606.213.000,00	40.532.776.500,00	92,72	39.582.288.027,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	1.607.440.000,00	2.009.429.000,00	125,00	998.862.500,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.458.563.000,00	5.629.239.000,00	162,82	4.806.029.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-SOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.511.581.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-SOP Pendidikan Kevelaran	964.107.700,00	609.308.800,00	63,16	1.490.400.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKS-BOK	9.092.524.000,00	6.176.487.377,00	67,92	2.231.745.135,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKS-Pengawasan Obat dan Makanan	308.601.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKS-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	11.183.271.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKS-BOKS	6.265.559.825,00	6.265.559.825,00	100,00	5.906.110.500,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKH	415.331.000,00	415.331.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Pemantauan Model	512.885.100,00	512.885.100,00	100,00	472.774.860,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKS-KB	0,00	0,00	0,00	7.039.475.082,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Catua Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.602.300.000,00	1.582.452.200,00	98,76	574.254.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-SOP PAUD Reguler	3.289.720.000,00	3.157.280.200,00	95,97	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-SOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.510.757.000,00	8.568.014.429,00	81,51	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	924.257.976.925,00	1.073.142.742.535,00	116,10	840.011.565.350,00
4.2.01.05	Dana Desa	236.111.096.000,00	236.111.096.000,00	100,00	231.144.301.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	236.111.096.000,00	236.111.096.000,00	100,00	231.144.301.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	236.111.096.000,00	236.111.096.000,00	100,00	231.144.301.000,00
4.2.01.06	Inentif Fisikal	19.463.679.000,00	19.463.679.000,00	100,00	37.041.386.000,00
4.2.01.06.01	Inentif Fisikal	19.463.679.000,00	19.463.679.000,00	100,00	37.041.386.000,00
4.2.01.06.01.0001	Inentif Fisikal	19.463.679.000,00	19.463.679.000,00	100,00	37.041.386.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	255.574.775.000,00	255.574.775.000,00	100,00	268.185.687.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.264.625.451,00	41.730.309.358,00	101,12	76.193.257.160,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.744.877.044,00	41.210.559.952,00	101,14	41.456.690.182,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.744.877.044,00	41.210.559.952,00	101,14	41.456.690.182,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.605.756.346,00	7.598.339.554,00	99,90	7.471.539.424,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.703.974.515,00	5.401.011.593,00	114,81	4.722.916.070,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.796.886.968,00	16.111.322.374,00	101,97	17.440.110.583,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.018.862,00	37.144.246,00	97,69	36.224.777,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.598.240.353,00	12.062.742.185,00	95,74	11.785.899.328,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	519.748.407,00	519.749.406,00	100,00	34.736.566.978,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	519.748.407,00	519.749.406,00	100,00	34.628.566.978,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	519.748.407,00	519.749.406,00	100,00	34.628.566.978,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	41.264.625.451,00	41.730.309.358,00	101,12	76.193.257.160,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.238.793.168.710,00	1.408.162.625.746,00	111,86	1.184.390.509.510,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.991.212.256,00	28.946.130.779,00	181,01	887.507.653,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	16.352.190.000,00	0,00	887.507.653,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	16.352.190.000,00	0,00	887.507.653,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0,00	16.352.190.000,00	0,00	887.507.653,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0,00	16.352.190.000,00	0,00	887.507.653,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.991.212.256,00	12.593.940.779,00	78,75	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.991.212.256,00	12.593.940.779,00	78,75	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.991.212.256,00	12.593.940.779,00	78,75	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	15.991.212.256,00	12.593.940.779,00	78,75	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.991.212.256,00	28.946.130.779,00	181,01	887.507.653,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08	1.351.975.407.387,50
5	BELANJA DAERAH	1.662.236.194.336,44	1.575.087.638.450,08	94,79	1.355.619.103.188,43
5.1	BELANJA PEGAWAI	1.011.235.710.153,80	959.902.973.470,71	94,03	830.599.987.687,43
5.1.01	Belanja Pegawai	594.166.113.448,00	593.211.693.335,40	94,11	515.827.796.498,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	388.421.884.748,00	373.652.455.377,00	96,19	327.425.364.603,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	289.029.651.866,00	284.420.506.902,00	98,41	248.313.696.021,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	240.313.116.664,00	245.943.602.891,00	98,64	234.383.617.921,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.689.935.302,00	38.478.204.611,00	96,94	13.930.078.100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.433.301.651,00	25.053.709.388,00	98,50	21.890.171.281,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.867.740.917,00	21.705.246.694,00	99,25	20.635.755.393,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.565.560.734,00	3.348.462.694,00	93,91	1.254.415.888,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.934.558.500,00	5.704.577.250,00	96,15	6.274.127.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.934.558.500,00	5.704.577.250,00	96,15	6.274.127.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.262.920.038,00	19.782.440.170,00	93,01	14.736.947.579,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.306.925.788,00	17.134.902.920,00	93,59	14.736.947.579,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.955.994.250,00	2.647.537.250,00	89,56	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.828.660.500,00	3.738.506.350,00	97,64	5.150.874.950,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.048.933.500,00	2.980.526.350,00	97,75	4.274.669.950,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	779.727.000,00	757.980.000,00	97,21	876.205.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.094.423.231,00	14.889.551.980,00	98,64	14.014.066.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.833.406.488,00	12.539.885.080,00	99,25	13.085.292.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.461.016.743,00	2.349.666.900,00	95,47	948.774.420,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.334.595.843,00	1.317.221.385,00	98,69	713.931.010,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.334.595.843,00	1.317.221.385,00	98,69	713.931.010,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.040.880,00	3.911.971,00	96,80	3.588.573,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.475.296,00	3.366.577,00	96,87	3.358.167,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	565.584,00	545.394,00	96,43	230.406,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.462.153.424,00	16.405.759.686,00	84,29	14.263.771.431,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.603.337.585,00	14.686.071.449,00	83,42	13.586.620.164,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.858.815.839,00	1.719.688.237,00	92,51	677.151.267,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	612.367.724,00	584.969.033,00	95,52	514.498.849,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	533.489.678,00	514.394.820,00	96,42	484.167.230,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.878.046,00	70.574.213,00	89,47	30.331.619,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.797.136.543,00	1.749.301.462,00	97,33	1.549.690.789,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.555.408.205,00	1.514.075.138,00	97,34	1.458.699.304,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	241.728.338,00	235.226.324,00	97,31	90.991.485,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.654.672.550,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.654.672.550,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.866.677.370,00	74.777.283.286,00	88,11	60.185.027.241,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.222.029.101,00	4.501.893.082,00	62,33	44.172.820.754,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.222.029.101,00	4.501.893.082,00	62,35	43.885.175.794,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.800.000,00	0,00	0,00	287.644.960,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	77.609.648.269,00	70.275.390.204,00	90,54	16.012.206.487,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	75.513.777.218,00	68.262.189.444,00	90,39	14.968.630.799,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.095.871.051,00	2.013.200.760,00	96,05	1.043.575.688,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.945.186.244,00	61.776.859.313,40	87,07	60.602.372.238,10
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.343.991.700,00	279.516.651,00	20,79	1.099.990.652,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.904.000,00	900.000,00	11,25	8.497.600,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	262.500.000,00	82.160.000,00	31,29	234.433.813,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.000.000,00	4.812.500,00	43,75	8.062.500,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.500.000,00	8.500.000,00	36,17	20.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	618.255.205,00	0,00	0,00	425.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	258.600,00	230.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000,00	3.187.500,00	53,12	5.241.305,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Serang Buntung Walet	2.250.000,00	50.000,00	2,22	2.112.500,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.566.187,00	30.200.000,00	39,96	21.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	100.503.477,00	4.456.651,00	4,43	96.046.826,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	227.172.831,00	145.000.000,00	63,82	270.596.108,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	344.456.448,00	6.834.015,00	1,98	144.609.480,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	200.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemangrehahan/Kabupaten	30.000.000,00	0,00	0,00	36.905.925,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000,00	5.377.500,00	48,88	7.097.500,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	34.042.114,00	0,00	0,00	21.749.933,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.062.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.874.250,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dari Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	4.578.623,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	193.700.000,00	1.456.515,00	0,75	29.635.438,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Persewaan	19.873.054,00	0,00	0,00	14.528.002,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	10.871.559,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Keperawatan	1.121.280,00	0,00	0,00	992.250,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lain Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lain Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pembangunan Bangunan Gedung	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	42.078.322.800,00	39.884.191.600,00	94,78	37.663.330.600,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	42.078.322.800,00	39.884.191.600,00	94,78	37.663.330.600,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.866.410.400,00	4.507.476.300,00	92,62	4.807.920.800,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.866.410.400,00	4.507.476.300,00	92,62	4.807.920.800,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tampil) Guru PNSD	1.467.000.000,00	1.381.250.000,00	94,15	1.281.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tampil Guru PNSD	1.467.000.000,00	1.381.250.000,00	94,15	1.281.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.940.903.147,00	12.830.959.680,40	75,73	12.980.518.778,10

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	533.489.678,00	514.394.820,00	96,42	484.167.230,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.878.046,00	70.574.213,00	89,47	30.331.619,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.797.136.543,00	1.749.301.462,00	97,33	1.549.690.789,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.555.408.205,00	1.514.075.138,00	97,34	1.458.699.304,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	241.728.338,00	235.226.324,00	97,31	90.991.485,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.654.672.550,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.654.672.550,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.866.677.370,00	74.777.283.286,00	88,11	60.185.027.241,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.222.029.101,00	4.501.893.082,00	62,33	44.172.820.754,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.222.029.101,00	4.501.893.082,00	62,35	43.885.175.794,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.800.000,00	0,00	0,00	287.644.960,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	77.609.648.269,00	70.275.390.204,00	90,54	16.012.206.487,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	75.513.777.218,00	68.262.189.444,00	90,39	14.968.630.799,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.095.871.051,00	2.013.200.760,00	96,05	1.043.575.688,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.945.186.244,00	61.776.859.313,40	87,07	60.602.372.238,10
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.343.991.700,00	279.516.651,00	20,79	1.099.990.652,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.904.000,00	900.000,00	11,25	8.497.600,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	262.500.000,00	82.160.000,00	31,29	234.433.813,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.000.000,00	4.812.500,00	43,75	8.062.500,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.500.000,00	8.500.000,00	36,17	20.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	618.255.205,00	0,00	0,00	425.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	258.600,00	230.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000,00	3.187.500,00	53,12	5.241.305,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Serang Buntung Walet	2.250.000,00	50.000,00	2,22	2.112.500,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.566.187,00	30.200.000,00	39,96	21.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	100.503.477,00	4.456.651,00	4,43	96.046.826,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	227.172.831,00	145.000.000,00	63,82	279.596.108,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	344.456.448,00	6.834.015,00	1,98	144.609.480,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	200.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemangrehatan/Kabupaten	30.000.000,00	0,00	0,00	36.905.925,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000,00	5.377.500,00	48,88	7.097.500,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	34.042.114,00	0,00	0,00	21.749.933,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.062.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.874.250,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dari Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	4.578.623,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	193.700.000,00	1.456.515,00	0,75	29.635.438,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Persewaan	19.873.054,00	0,00	0,00	14.528.002,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	10.871.559,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Keperawatan	1.121.280,00	0,00	0,00	992.250,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lain Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lain Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pembangunan Bangunan Gedung	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	42.078.322.800,00	39.884.191.600,00	94,78	37.663.330.600,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	42.078.322.800,00	39.884.191.600,00	94,78	37.663.330.600,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.866.410.400,00	4.507.476.300,00	92,62	4.807.920.800,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.866.410.400,00	4.507.476.300,00	92,62	4.807.920.800,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tampil) Guru PNSD	1.467.000.000,00	1.381.250.000,00	94,15	1.281.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tampil Guru PNSD	1.467.000.000,00	1.381.250.000,00	94,15	1.281.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.940.903.147,00	12.830.959.680,40	75,73	12.980.518.778,10

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.940.903.147,00	12.830.959.680,40	75,73	12.980.516.776,10
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.070.424.307,00	457.959.967,00	42,76	2.624.751.928,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	975.016.307,00	373.703.967,00	38,32	2.255.568.408,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	95.408.000,00	84.256.000,00	88,31	312.183.520,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.511.409.600,00	1.276.789.500,00	84,47	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	1.511.409.600,00	1.276.789.500,00	84,47	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	630.000.000,00	597.381.600,00	94,82	0,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	630.000.000,00	597.381.600,00	94,82	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamis) Guru PPPK	692.267.842,00	554.500.000,00	80,09	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamis Guru PPPK	692.267.842,00	554.500.000,00	80,09	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.698.245.086,00	11.255.797.090,00	96,21	11.462.321.002,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	549.885.000,00	97,92	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	549.885.000,00	97,92	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.974.100,00	45.939.600,00	93,80	49.509.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.974.100,00	45.939.600,00	93,80	49.509.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.398.280,00	59.022.300,00	97,72	60.832.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.398.280,00	59.022.300,00	97,72	60.832.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	35.469.000,00	73,69	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	35.469.000,00	73,69	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	797.333.250,00	97,92	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	797.333.250,00	97,92	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.455.100,00	55.771.335,00	73,91	75.456.990,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.455.100,00	55.771.335,00	73,91	75.456.990,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.048.500,00	6.744.675,00	67,12	8.952.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.048.500,00	6.744.675,00	67,12	8.952.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.087.000.000,00	98,00	3.150.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.087.000.000,00	98,00	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	606.000.000,00	504.000.000,00	75,07	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	606.000.000,00	504.000.000,00	75,07	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	317.372,00	203.008,00	63,96	276.808,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	317.372,00	203.008,00	63,96	276.808,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.696.141.734,00	2.636.016.822,00	97,78	2.698.287.504,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Tunjangan Kesejahteraan bagi DPRD	48.691.062,00	47.590.862,00	97,74	48.866.832,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	1.132.068,00	98,00	1.155.168,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.465.504,00	3.396.392,00	35,88	3.465.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.644.800.000,00	2.303.900.000,00	87,16	2.644.800.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.329.100.000,00	3.244.050.000,00	97,44	3.207.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.329.100.000,00	3.244.050.000,00	97,44	3.207.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.935.000,00	234.300.000,00	99,31	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.935.000,00	234.300.000,00	99,31	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	92.320.064,00	91.449.600,00	98,08	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00	90.240.000,00	99,51	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00	90.240.000,00	99,51	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.600.000,00	1.209.600,00	75,59	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.600.000,00	1.209.600,00	75,59	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.000.000,00	788.000.000,00	98,25	733.200.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.000.000,00	168.000.000,00	83,16	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.000.000,00	168.000.000,00	83,16	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	531.600.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	531.600.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai SLUD	37.339.800.000,00	36.949.848.689,00	98,95	35.419.511.414,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai SLUD	37.339.800.000,00	36.949.848.689,00	98,95	35.419.511.414,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai SLUD	37.339.800.000,00	36.949.848.689,00	98,95	35.419.511.414,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.339.649.720,80	301.776.889.797,11	92,19	249.787.837.226,53
5.1.02.01	Belanja Barang	70.589.439.905,90	66.110.699.396,85	93,65	54.070.216.424,28
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.456.749.937,90	63.064.035.354,85	93,48	53.877.094.824,28
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	224.757.280,00	201.608.435,00	89,70	428.598.965,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	547.833.350,00	536.479.750,00	97,92	448.525.619,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.757.949.615,00	2.516.338.729,00	91,23	1.924.938.759,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.091.010,00	4.091.010,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.161.000,00	13.161.000,00	100,00	35.310.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas	46.470.400,00	35.394.400,00	73,02	37.856.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34.290.000,00	34.290.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.882.911.225,00	3.629.438.358,00	93,47	4.725.389.221,28
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	22.020.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.060.000,00	2.060.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.125.744.279,71	3.021.633.477,00	96,68	3.105.425.785,22
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.329.277.602,78	2.151.092.638,85	92,35	2.163.666.957,67
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.363.127.198,00	4.943.054.642,00	92,16	4.631.424.105,89
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	196.787.400,00	187.378.800,00	95,21	194.670.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.093.845.356,00	2.960.980.609,00	95,70	2.935.292.318,17
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	802.308.268,64	767.809.742,00	95,70	659.933.263,40
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.305.835.389,80	1.074.480.744,00	82,28	522.557.842,65
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.135.296.519,00	1.125.308.869,00	99,12	1.442.751.984,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	304.178.404,00	301.542.676,00	99,13	252.706.394,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	154.806.700,00	133.754.100,00	86,40	150.705.300,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.934.094.992,00	1.911.028.060,00	98,80	1.386.959.682,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.001.392.348,00	3.620.207.028,00	72,37	5.550.899.058,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	289.930.000,00	277.225.800,00	95,61	17.929.515,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.612.272.255,12	18.511.244.066,00	99,45	7.511.462.287,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Nutrisi dan Pakan-Pakan	415.657.900,00	415.082.256,00	99,86	581.888.341,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.458.083.789,00	3.859.663.115,00	86,57	4.111.294.376,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.945.865.042,00	2.912.496.600,00	98,86	3.013.860.900,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	149.615.500,00	111.894.000,00	74,78	65.350.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	407.205.000,00	407.190.000,00	99,99	368.036.600,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.455.617.013,85	5.952.046.350,00	92,19	5.500.376.850,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakelan Dinas KDH dan WZDH	64.000.000,00	62.500.000,00	97,62	186.382.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakelan Dinas dan Atribut Pergumulan dan Anggota DPRD	531.250.000,00	530.000.000,00	99,76	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	97.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (PDL)	49.853.600,00	49.851.600,00	100,00	1.203.232.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakelan Dinas Upacara (PDU)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	22.200.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakelan Siega	7.310.000,00	7.310.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakelan Adat Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional	178.350.000,00	169.466.000,00	95,01	267.017.800,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakelan Olahraga	349.121.500,00	347.126.500,00	99,42	51.619.200,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakelan Pasakbraka	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	89.632.500,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakelan Jas/Safari	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	6.300.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	192.231.800,00
5.1.02.01.02.0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	33.877.200,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	4.053.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	154.301.400,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.112.689.968,00	3.046.664.042,00	97,85	0,00
5.1.02.01.04.0006	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bangsal dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0151	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar WPT/PM	30.000.000,00	27.500.000,00	91,66	0,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	35.400.000,00	34.530.842,00	97,54	0,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.216.615.617,00	1.205.288.900,00	99,06	0,00
5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.671.174.351,00	1.601.280.200,00	95,81	0,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pakir	154.500.000,00	153.264.000,00	99,20	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	90.657.239.106,14	76.609.539.407,00	84,50	75.246.846.109,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.878.554.692,14	70.659.655.860,00	90,73	69.881.341.265,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.875.217.115,00	3.283.014.080,00	84,71	2.546.438.449,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.751.318.559,00	13.735.565.351,00	93,11	16.449.009.005,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00	24.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanawan	34.220.000,00	21.020.000,00	61,42	32.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.095.400,00	24.595.400,00	98,00	5.760.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00	9.875.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	160.101.500,00	152.151.500,00	95,03	417.365.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	537.600.000,00	464.600.000,00	86,42	480.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.523.000.000,00	5.453.000.000,00	98,73	6.063.405.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.009.335.000,00	342.386.000,00	33,92	975.800.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	68.000.000,00	66.288.000,00	97,48	119.261.600,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	185.000.000,00	96.000.000,00	51,89	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.568.508.000,00	1.566.145.500,00	99,84	1.796.053.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	666.800.000,00	661.600.000,00	99,22	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.754.882.952,00	1.376.029.267,00	78,41	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	419.000.000,00	419.000.000,00	100,00	166.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Anjip dan Perpustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Keserian dan Kebudayaan	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	10.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.114.179.840,00	7.252.994.593,00	89,38	9.383.136.243,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	454.650.000,00	426.400.000,00	93,78	229.168.181,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.525.310.400,00	5.272.220.400,00	95,41	4.467.059.822,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.828.829.550,00	3.373.900.950,00	88,11	1.914.102.450,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.103.550.000,00	5.015.475.911,00	98,31	5.012.503.175,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.095.100.000,00	1.583.200.000,00	93,39	1.016.663.636,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	563.760.000,00	547.200.000,00	97,06	606.776.364,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	8.000.000,00	0,00	0,00	255.842.758,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Perhandingan	198.280.000,00	193.480.000,00	97,57	23.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	12.250.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	119.400.000,00	109.699.500,00	91,84	192.473.293,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	704.727.632,00	568.856.719,00	80,72	274.426.992,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	536.800.000,00	535.378.500,00	99,73	34.930.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.428.957.000,00	1.228.170.544,00	86,01	908.929.750,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakar, Alat Keserian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	63.114.618,00	61.401.200,00	97,28	187.535.098,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	452.155.250,00	335.681.250,00	74,24	353.995.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Rian/Reklame, Film dan Promobralan	1.423.185.830,00	1.211.016.400,00	85,09	1.029.814.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	5.612.737,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.377.716,00	11.189.702,00	45,90	20.581.914,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.955.574.287,54	10.959.931.285,00	91,63	10.916.481.798,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	162.844.650,00	129.374.000,00	79,53	144.638.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawal/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.442.489.188,00	2.062.879.572,00	84,45	1.950.597.800,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Programan	90.563.890,00	43.371.390,00	47,87	37.823.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	200.000.000,00	149.952.565,00	74,97	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Kewargaitaan	1.788.390.000,00	1.612.717.750,00	90,17	1.581.752.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	209.000.000,00	148.478.531,00	71,04	152.459.700,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	13.720.000,00	11.448.000,00	83,44	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	6.511.674.062,00	301.224.553,00	4,62	702.294.393,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	4.754.976.881,00	0,00	0,00	6.834.500,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	716.401.200,00	0,00	0,00	405.064.203,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.552.000,00	6.552.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	277.897.661,00	266.264.233,00	95,81	259.810.090,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.445.120,00	28.408.318,00	96,47	30.585.600,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	728.401.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.03.0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.747.557.486,00	1.519.075.761,00	86,93	1.578.501.050,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	25.600.000,00	19.800.000,00	77,34	9.500.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaran Bermotor Penumpang	423.465.948,00	380.561.823,00	89,88	248.869.600,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaran Bermotor Angkutan Barang	42.121.000,00	38.089.000,00	90,42	74.491.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	927.187.538,00	783.646.938,00	84,51	807.107.350,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	88.778.000,00	83.078.000,00	93,57	135.100.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	208.200.000,00	181.700.000,00	87,27	226.078.700,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	17.205.000,00	17.200.000,00	99,97	42.254.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.086.176.000,00	857.118.000,00	78,91	817.533.102,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.740.000,00	2.000.000,00	34,84	53.932.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	492.948.000,00	410.878.000,00	83,35	327.300.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	112.857.252,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Grlongan I	72.234.000,00	68.200.000,00	94,41	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	342.608.000,00	296.040.000,00	86,40	234.749.500,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	92.646.000,00	0,00	0,00	88.694.350,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.336.800,00	25.336.800,00	100,00	724.286.600,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	25.336.800,00	25.336.800,00	100,00	724.286.600,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.205.000.000,00	1.137.028.100,00	94,35	1.168.996.100,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	120.485.600,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	74.760.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.140.000.000,00	1.137.028.100,00	99,73	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang/Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	973.750.500,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	816.555.000,00	816.555.000,00	100,00	312.500.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	56.555.000,00	56.555.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	760.000.000,00	760.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Simposium, Konferensi, Pendidikan dan Pelatihan	1.383.395.000,00	1.290.545.335,00	93,38	61.393.599,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus/Pelatihan	1.361.880.000,00	1.289.545.335,00	94,78	61.393.599,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.105.725.866,70	18.396.549.390,72	96,28	15.118.963.526,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	16.425.000,00	16.372.500,00	99,68	0,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Perulu-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	16.425.000,00	16.372.500,00	99,68	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perolehan dan Mesin	6.971.157.629,70	6.271.849.871,00	90,11	8.666.443.131,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Bakaywan	211.788.600,00	211.788.000,00	99,99	211.891.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Ulul Pemeliharaan Lapangan	10.189.800,00	10.110.000,00	99,21	9.980.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.689.340.809,70	2.641.737.257,00	98,22	2.797.812.356,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bantulah Penunjang	1.617.645.032,00	1.399.048.860,00	86,55	3.635.720.290,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	520.711.151,00	450.726.671,00	86,55	373.079.155,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.400.000,00	14.040.000,00	68,82	20.389.000,00
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.568.000,00	8.558.000,00	99,85	8.505.000,00
5.1.02.03.02.0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tulang Kayu	0,00	0,00	0,00	4.191.600,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	40.985.000,00	99,96	55.955.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman (ikan/Ternak)	13.500.000,00	13.482.800,00	99,86	176.628.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor/Alat Kantor Lainnya	169.710.000,00	107.425.500,00	63,66	57.914.627,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	31.440.000,00	30.620.000,00	97,39	18.168.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	652.614.000,00	616.936.757,00	94,53	531.849.135,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.860.000,00	15.833.000,00	99,82	26.330.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	18.856.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	71.850.000,00	0,00	0,00	71.768.715,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	24.400.000,00	21.070.000,00	86,35	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	524.748.200,00	505.222.270,00	96,27	428.494.550,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	148.690.000,00	122.280.598,00	82,23	59.978.303,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.891.037,00	1.927.358,00	66,66	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	149.735.000,00	132.718.500,00	88,63	148.336.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	28.000.000,00	27.370.000,00	97,75	29.653.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.748.203.237,00	9.639.894.923,72	98,88	3.781.554.095,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.713.158.754,00	7.608.296.223,72	98,64	2.867.402.529,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.984.270.925,00	1.961.013.700,00	99,83	323.128.616,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.773.558,00	50.585.000,00	99,62	591.022.950,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	369.960.000,00	368.432.096,00	99,58	670.966.300,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	369.960.000,00	368.432.096,00	99,58	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	670.966.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.654.546.705,00	41.501.782.380,00	90,90	46.603.163.534,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.654.546.705,00	41.501.782.380,00	90,90	46.603.163.534,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.558.561.195,00	33.411.550.661,00	91,39	31.652.233.161,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.751.649.126,00	5.958.193.535,00	88,24	14.175.613.373,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.344.336.184,00	2.332.036.184,00	99,94	775.117.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.474.919.960,00	1.418.856.072,00	96,19	1.000.771.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.474.919.960,00	1.418.856.072,00	96,19	980.771.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	1.027.371.060,00	971.355.952,00	94,54	977.771.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suku Prestasi	447.548.900,00	447.500.120,00	99,98	3.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.322.901.879,00	21.917.242.433,00	98,18	16.667.092.212,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.322.901.879,00	21.917.242.433,00	98,18	16.667.092.212,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.322.901.879,00	21.917.242.433,00	98,18	16.667.092.212,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.067.082.743,00	7.753.425.234,00	85,53	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.067.082.743,00	7.753.425.234,00	85,53	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.067.082.743,00	7.753.425.234,00	85,53	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.467.794.455,00	68.068.595.483,74	99,41	43.080.784.421,25
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.467.794.455,00	68.068.595.483,74	99,41	43.080.784.421,25
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.467.794.455,00	68.068.595.483,74	99,41	43.080.784.421,25
5.1.04	Belanja Subsidi	3.099.595.547,00	3.099.491.342,00	100,00	2.274.949.200,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.148.912.897,00	2.148.806.492,00	99,99	977.949.300,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.148.912.897,00	2.148.806.492,00	99,99	977.949.300,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.148.912.897,00	2.148.806.492,00	99,99	977.949.300,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	950.685.650,00	950.684.650,00	99,99	1.296.999.900,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	950.685.650,00	950.684.650,00	99,99	1.296.999.900,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	950.685.650,00	950.684.650,00	99,99	1.296.999.900,00
5.1.05	Belanja Hibah	74.434.259.719,00	76.937.889.176,00	103,36	51.700.214.763,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.289.052.600,00	42.106.454.704,00	107,17	17.059.126.070,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	39.289.052.600,00	42.106.454.704,00	107,17	17.059.126.070,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	39.289.052.600,00	42.106.454.704,00	107,17	17.059.126.070,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.318.600,00	2.318.600,00	100,00	59.126.070,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.318.600,00	2.318.600,00	100,00	59.126.070,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	34.113.650.455,00	33.799.887.608,00	99,08	31.115.471.296,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	982.603.500,00	982.603.500,00	100,00	530.669.600,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	982.603.500,00	982.603.500,00	100,00	530.669.600,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	249.886.000,00	99,95	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	249.886.000,00	99,95	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	32.881.046.955,00	32.567.398.308,00	99,04	27.079.220.698,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	798.500.000,00	798.500.000,00	100,00	1.208.178.500,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	32.082.546.955,00	31.768.898.308,00	99,02	25.871.042.198,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	3.505.581.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	3.505.581.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	2.533.987.395,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikdes Swasta	0,00	0,00	0,00	790.878.096,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikdes Swasta	0,00	0,00	0,00	790.878.096,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	1.743.109.299,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	1.743.109.299,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.031.556.664,00	1.031.556.664,00	100,00	991.630.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.031.556.664,00	1.031.556.664,00	100,00	991.630.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.031.556.664,00	1.031.556.664,00	100,00	991.630.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.186.088.719,00	9.877.200.000,00	96,96	11.009.190.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.373.088.719,00	9.140.700.000,00	97,52	10.269.690.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.373.088.719,00	9.140.700.000,00	97,52	10.269.690.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.373.088.719,00	9.140.700.000,00	97,52	10.269.690.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	703.000.000,00	686.000.000,00	97,58	438.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	703.000.000,00	686.000.000,00	97,58	438.500.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	703.000.000,00	686.000.000,00	97,58	438.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00	50.500.000,00	45,90	120.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00	50.500.000,00	45,90	120.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00	50.500.000,00	45,90	120.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.011.225.710.153,80	950.902.973.470,71	94,03	830.599.987.687,43
5.2	BELANJA MODAL	304.794.691.641,03	298.623.438.703,37	97,97	312.637.551.225,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	2.027.975.844,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	2.027.975.844,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Perak	0,00	0,00	0,00	2.027.975.844,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Perak Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.027.975.844,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.342.835.798,03	41.324.926.997,00	97,12	35.027.840.042,80
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	101.118.800,00	101.187.793,00	99,87	623.332.844,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	25.410.794,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	25.410.794,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	101.118.800,00	101.187.793,00	99,87	597.922.050,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	5.654.700,00	5.654.700,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	41.600.900,00	41.550.000,00	99,87	21.134.550,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	54.064.100,00	53.983.093,00	99,85	576.787.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.066.553.407,00	11.925.744.730,00	98,80	4.797.018.495,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.066.553.407,00	11.925.744.730,00	98,80	4.739.328.495,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.501.853.000,00	3.344.000.000,00	95,49	381.800.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Perumpang	750.000.000,00	739.000.000,00	98,53	1.691.500.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000.000,00	997.844.730,00	99,78	529.100.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.157.680.407,00	1.099.246.000,00	94,93	558.558.495,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.616.820.000,00	5.645.654.000,00	99,80	1.598.370.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	37.690.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.690.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.509.840,00	50.509.840,00	100,00	188.162.500,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.690.000,00	2.690.000,00	100,00	16.107.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	2.690.000,00	2.690.000,00	100,00	15.495.000,00
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	47.813.840,00	47.813.840,00	100,00	128.055.500,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	12.813.840,00	12.813.840,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	28.055.500,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.887.201.468,00	1.805.736.740,00	95,68	7.903.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.887.201.468,00	1.805.736.740,00	95,68	7.903.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	21.030.000,00	21.030.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	506.752.666,00	425.794.636,00	84,00	7.903.800,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	77.418.800,00	77.002.704,00	99,46	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.954.385.961,03	5.658.318.084,00	95,02	3.582.068.041,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	591.568.600,01	561.963.400,00	94,99	249.520.900,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.571.500,04	1.671.500,00	65,00	754.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	8.300.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	262.352.700,00	261.410.900,00	99,64	64.229.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	296.644.399,97	268.881.000,00	90,64	176.237.900,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.173.517.361,02	4.920.735.684,00	95,11	3.225.168.691,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.384.287.738,00	2.322.125.204,00	97,39	1.504.433.636,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.776.000,00	7.501.312,00	96,46	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.373.185.344,00	1.239.162.700,00	90,24	856.974.590,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.389.480,00	11.794.520,00	82,08	9.142.025,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.372.576.719,02	1.319.105.948,00	96,10	847.731.440,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.322.080,00	21.046.000,00	98,70	6.885.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat/Pejabat	189.708.000,00	175.619.000,00	92,77	107.378.450,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arap Pejabat	166.800.000,00	153.119.000,00	91,79	107.378.450,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	822.789.255,00	811.490.000,00	98,62	318.225.460,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	384.845.200,00	380.865.000,00	99,17	232.635.550,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	251.865.200,00	249.215.000,00	99,28	188.620.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	102.980.000,00	101.650.000,00	98,70	34.015.550,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	51.388.855,00	44.175.000,00	85,96	85.589.910,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Teleponia	27.000.000,00	26.450.000,00	97,96	6.759.910,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	24.388.855,00	17.723.000,00	72,67	47.970.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	387.355.200,00	386.450.000,00	99,76	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	387.355.200,00	386.450.000,00	99,76	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kesehatan dan Kesejahteraan	3.403.214.601,00	3.207.678.365,00	94,25	12.896.120.031,80
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.403.214.601,00	3.207.678.365,00	94,25	1.721.261.594,80
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	123.782.638,00	70.744.734,00	57,13	608.405.594,80
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	445.000.000,00	402.000.000,00	89,73	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kelamin	0,00	0,00	0,00	302.726.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	808.000.000,00	606.300.000,00	75,00	0,00
5.2.02.07.01.0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	73.800.000,00	55.630.000,00	75,36	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.018.856.019,00	1.015.948.331,00	99,71	0,00
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	39.737.000,00	32.990.100,00	83,02	0,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	809.500.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.092.378.313,00	1.024.665.000,00	93,74	630.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	11.174.858.437,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.174.858.437,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	396.284.000,00	396.000.000,00	99,92	1.439.380.144,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.439.380.144,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	1.439.380.144,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	396.284.000,00	396.000.000,00	99,92	0,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	396.284.000,00	396.000.000,00	99,92	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.023.447.289,00	8.716.595.636,00	96,59	5.385.348.010,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.125.402.140,00	6.918.740.903,00	97,09	3.769.522.127,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.125.402.140,00	6.918.740.903,00	97,09	3.769.522.127,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.898.045.149,00	1.797.854.733,00	94,72	1.615.825.883,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.684.136.239,00	1.604.850.539,00	95,29	965.476.883,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	153.908.910,00	148.214.194,00	96,29	434.680.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	44.790.000,00	74,65	215.669.000,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Penggeboran	157.344.093,00	157.202.400,00	99,90	0,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Penggeboran Mesin	157.344.093,00	157.202.400,00	99,90	0,00
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Penggeboran Mesin Lainnya	157.344.093,00	157.202.400,00	99,90	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	71.040.000,00	70.500.000,00	99,23	55.150.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.740.000,00	10.200.000,00	94,97	30.200.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	10.740.000,00	10.200.000,00	94,97	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	60.300.000,00	60.300.000,00	100,00	24.950.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	60.300.000,00	60.300.000,00	100,00	24.950.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percobaan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	49.440.000,00	49.408.000,00	99,93	42.429.750,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	49.440.000,00	49.408.000,00	99,93	42.429.750,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	49.440.000,00	49.408.000,00	99,93	42.429.750,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.037.414.301,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.037.414.301,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.037.414.301,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.406.613.084,00	3.322.253.640,00	97,52	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.406.613.084,00	3.322.253.640,00	97,52	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.406.613.084,00	3.322.253.640,00	97,52	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.950.000.000,00	4.949.507.969,00	99,99	3.642.086.666,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.950.000.000,00	4.949.507.969,00	99,99	3.642.086.666,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.950.000.000,00	4.949.507.969,00	99,99	3.642.086.666,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.621.353.297,00	46.275.977.219,00	97,17	25.117.520.213,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.500.900.297,00	46.260.377.219,00	97,38	24.807.764.868,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.242.929.417,00	45.975.095.339,00	97,37	24.612.576.948,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.939.319.919,00	10.665.471.689,00	97,49	7.023.535.133,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	105.000.000,00	154.822.000,00	79,39	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.107.985.132,00	10.678.220.670,00	96,13	3.394.788.600,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.295.308.849,00	19.156.091.881,00	99,27	12.451.363.095,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	165.026.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koprala/Pasar	0,00	0,00	0,00	20.845.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30.000.000,00	49.531.000,00	99,06	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.778.735.757,00	3.770.843.436,00	99,79	506.470.800,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	79.964.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.894.930.810,00	1.350.215.469,69	78,66	970.584.320,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	287.970.896,00	285.281.080,00	99,06	195.187.920,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggugungan	285.281.896,00	285.281.080,00	100,00	195.187.920,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu/Pilar Kontrol/Pasir	120.452.000,00	15.600.000,00	12,95	309.755.345,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	120.452.000,00	15.600.000,00	12,95	309.755.345,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	120.452.000,00	15.600.000,00	12,95	309.755.345,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Jembatan	210.658.970.677,00	207.026.881.118,37	98,27	146.620.906.038,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.327.358.251,06	113.435.014.398,37	97,51	86.816.225.628,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	107.915.818.551,00	105.424.221.899,37	97,69	82.807.467.134,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	92.942.276.383,00	90.703.426.516,00	97,59	73.764.049.705,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	198.001.233,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	39.300.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	14.973.542.668,00	14.726.796.142,37	98,31	8.806.116.196,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.411.539.700,00	8.010.792.740,00	95,23	4.008.758.494,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.411.539.700,00	8.010.792.740,00	95,23	4.008.758.494,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.572.723.705,00	16.425.868.446,00	99,11	10.130.742.780,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.238.532.100,00	12.175.772.471,40	99,48	6.106.860.800,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.070.000.000,00	7.055.675.100,00	99,79	4.981.952.200,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	5.168.532.100,00	5.120.097.371,40	99,06	1.124.908.600,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.018.514.804,00	1.955.461.624,60	96,87	1.693.984.430,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.018.514.804,00	1.955.461.624,60	96,87	1.693.984.430,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.315.676.801,00	2.294.634.350,00	99,09	2.329.897.550,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	672.361.101,00	653.428.050,00	97,18	591.684.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.643.315.700,00	1.641.206.300,00	99,87	1.738.213.550,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	77.758.888.721,00	77.165.998.274,00	99,23	49.673.937.630,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.808.078.513,00	3.598.973.149,00	94,50	835.717.275,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.808.078.513,00	3.598.973.149,00	94,50	835.717.275,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	72.000.810.208,00	71.736.569.815,00	99,63	48.838.220.355,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	65.585.966.603,00	65.348.413.260,00	99,63	45.641.374.150,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	6.414.843.605,00	6.388.156.555,00	99,58	3.196.846.205,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.850.000.000,00	1.830.455.310,00	98,94	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.850.000.000,00	1.830.455.310,00	98,94	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.171.433.069,00	4.195.653.369,00	100,58	3.843.309.088,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	112.265.000,00	46.202.000,00	41,15	246.813.620,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	112.265.000,00	46.202.000,00	41,15	246.813.620,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	109.052.000,00	43.052.000,00	39,47	11.969.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	3.213.000,00	3.150.000,00	98,03	194.844.620,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Beracak Kesenian/Kebudayaan/Clahraga	212.160.000,00	211.950.000,00	99,90	8.100.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Beracak Kesenian	8.100.000,00	8.100.000,00	99,28	8.100.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Beracak Kesenian Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	99,28	8.100.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Beracak Kebudayaan	204.000.000,00	203.850.000,00	99,92	0,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Beracak Kebudayaan Lainnya	204.000.000,00	203.850.000,00	99,92	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.588.395.468,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.588.395.468,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.588.395.468,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BDSP	3.847.008.069,00	3.937.501.369,00	102,35	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BDSP-BOS	3.847.008.069,00	3.937.501.369,00	102,35	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BDSP-BOS Reguler	3.847.008.069,00	3.937.501.369,00	102,35	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	504.794.891.841,03	298.623.438.703,37	59,17	212.637.551.225,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	20.648.566.065,61	0,00	0,00	600.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	325.561.226.276,00	325.561.226.276,00	100,00	311.781.564.275,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.856.299.476,00	3.856.299.476,00	100,00	3.712.949.200,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.615.949.276,00	2.615.949.276,00	100,00	2.577.622.175,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.615.949.276,00	2.615.949.276,00	100,00	2.577.622.175,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.615.949.276,00	2.615.949.276,00	100,00	2.577.622.175,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.040.350.200,00	1.040.350.200,00	100,00	1.135.327.025,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.040.350.200,00	1.040.350.200,00	100,00	1.135.327.025,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.040.350.200,00	1.040.350.200,00	100,00	1.135.327.025,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.904.926.800,00	321.904.926.800,00	100,00	308.068.615.075,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.904.926.800,00	321.904.926.800,00	100,00	308.068.615.075,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	314.438.266.800,00	314.438.266.800,00	100,00	298.069.596.150,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	298.069.596.150,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	314.438.266.800,00	314.438.266.800,00	100,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.466.660.000,00	7.466.660.000,00	100,00	9.999.018.925,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	9.999.018.925,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.466.660.000,00	7.466.660.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	325.561.226.276,00	325.561.226.276,00	100,00	311.781.564.275,00
	JUMLAH BELANJA	1.662.230.194.336,44	1.575.087.638.450,08	94,75	1.355.619.103.188,43
	SURPLUS/DEFISIT	(224.824.158.168,44)	36.000.182.155,80	18,01	(3.643.695.800,93)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	224.824.158.168,44	104.115.523.168,44	46,30	107.759.218.969,37
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.824.158.168,44	104.115.523.168,44	46,30	108.009.218.969,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	224.824.158.168,44	104.115.523.168,44	46,30	108.009.218.969,37
6.1.01.01	Pelampasan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	287.228.044,00
6.1.01.01.04	Pelampasan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	287.228.044,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampasan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00	0,00	287.228.044,00
6.1.01.02	Pelampasan Penerimaan Pendapatan Transfer	120.708.635.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampasan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	120.708.635.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampasan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	120.708.635.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	95.357.928.713,21	95.357.928.713,21	100,00	96.220.335.090,90
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	95.357.928.713,21	95.357.928.713,21	100,00	96.220.335.090,90
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	95.357.928.713,21	95.357.928.713,21	100,00	96.220.335.090,90
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	8.757.594.455,23	8.757.594.455,23	100,00	11.501.655.834,47
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.757.594.455,23	8.757.594.455,23	100,00	11.471.954.047,44
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.757.594.455,23	8.757.594.455,23	100,00	11.471.954.047,44
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.498.584,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.498.584,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapital	0,00	0,00	0,00	23.203.203,03
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapital	0,00	0,00	0,00	23.203.203,03
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.824.158.168,44	104.115.523.168,44	46,30	108.009.218.969,37
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	224.824.158.168,44	104.115.523.168,44	46,30	107.759.218.969,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	140.115.705.324,24	0,00	104.115.523.168,44

Kab. Aceh Barat, 14 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Zulyadi, SE, Ak
NP.197208282001121002